

**PENGARUH KEBIJAKAN SUBSIDI, *FOREIGN DIRECT INVESTMENT*
(FDI) DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI
(STUDI KASUS NEGARA – NEGARA DI ASEAN)**

(Tesis)

Oleh

RENIZA HELENA PUTRI



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF SUBSIDY POLICIES, FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) AND GOOD GOVERNANCE ON ECONOMIC GROWTH (CASE STUDIES OF ASEAN COUNTRIES)

By

Reniza Helena Putri

This study aims to determine how the subsidy policy, FDI and good governance influence economic growth in seven ASEAN countries. By using the panel data method, where the data used is secondary data obtained from World Bank. The subsidy policy must be on target so that it can increase economic growth in the long run. Besides that, FDI must be able to become a means of technology transfer and absorb labor for investment destination countries. Good governance will be a supporter of more effective economic growth in the future, where the security and comfort of a country becomes the main focus, both for the government and the people of the country itself and investors and tourist.

Keywords: *Economic Growth, Subsidies, Foreign Direct Investment (FDI), Good Governance*

ABSTRAK

PENGARUH KEBIJAKAN SUBSIDI, *FOREIGN DIRECT INVESTMENT* (FDI) DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Kasus Negara-Negara di ASEAN)

Oleh

Reniza Helena Putri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan subsidi, FDI, dan tata kelola pemerintahan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari tujuh negara di ASEAN. Dengan menggunakan metode data panel, di mana data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari World Bank. Kebijakan subsidi harus tepat sasaran agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Selain itu, FDI harus mampu menjadi alat transfer teknologi dan menyerap tenaga kerja bagi negara tujuan investasi. Tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih efektif untuk kedepan, di mana faktor keamanan dan kenyamanan suatu negara menjadi fokus utama, baik untuk pemerintahan dan masyarakat negara itu sendiri maupun para investor dan wisatawan.

Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi, Subsidi, Foreign Direct Investment (FDI),
Tata Kelola Pemerintahan

**PENGARUH KEBIJAKAN SUBSIDI, *FOREIGN DIRECT INVESTMENT*
(FDI) DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI
(STUDI KASUS NEGARA – NEGARA DI ASEAN)**

Oleh

RENIZA HELENA PUTRI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Jaya pada tanggal 6 Februari 1989, sebagai anak ketiga dari lima bersaudara pasangan Bapak Hi. Murtado dan Ibu Hj. Amanatun.

Penulis memulai Pendidikannya di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyah Bustanul Atfal Bandar Jaya yang diselesaikan tahun 1995. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Bandar Jaya yang diselesaikan pada tahun 2001. Selanjutnya, penulis meneruskan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Terbanggi Besar yang diselesaikan pada tahun 2004, dan selanjutnya pada tahun yang sama penulis meneruskan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Terbanggi Besar yang diselesaikan pada tahun 2007. Pada tahun 2007, penulis diterima menjadi mahasiswi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Kemampuan Akademik dan Bakat (PKAB) yang diselesaikan pada tahun 2011.

Pada tahun 2015, penulis diterima menjadi Mahasiswi Jurusan Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTTO

Yakinlah bahwa Allah sebaik-baik penolong, selama kita berusaha dan berdoa
maka tidak akan ada hasil yang sia-sia dalam hidup kita.

Jangan bahagia baru bersyukur, tetapi bersyukurlah agar selalu bahagia.

(Reniza Helena Putri)

Kupersembahkan karya ku kepada orang-orang yang kucintai:

Suami dan anakku tercinta, yang dengan keikhlasannya mengiringi langkah-langkah ini dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan.

Ibu dan Buyah tersayang, yang telah menjadi sumber kekuatan selama ini melalui doa dan kasih sayang yang tidak berujung.

Mama dan Papa, yang telah mendukung dan mendoakan dalam segala hal.

Kakak dan Adikku, yang selalu memberikan semangat dan keceriaan.

Sahabat-sahabat yang telah memberikan warna dalam perjalanan hidupku.

Almamater tercinta...

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Subsidi, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Negara-Negara ASEAN)” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Jurusan Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu Dr. Marselina, S.E., M. P. M., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan arahan, saran, nasehat, dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;
2. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II dan selaku Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan arahan, saran, nasehat, dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;

3. Bapak Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian tesis ini;
4. Ibu Dr. Lies Maria Hamzah, S.E., M. E., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian tesis ini;
5. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
6. Seluruh dosen Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah memberikan didikan dan ilmu yang bermanfaat;
7. Segenap staf administrasi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Sella, Mbak Wanti, dan Mas Bolang atas bantuannya;
8. Suamiku, M. Iedham Azis yang dengan segala cinta dan kesabarannya menjadi teman, suami, ayah dan imam yang baik untuk keluarga kecil kita;
9. Anakku tersayang, Muhammad Rashaad Attariqh, separuh jiwaku, penyemangat dan tawaku, terus tumbuh sehat dan bahagia menjadi anak sholeh;
10. Kedua orang tuaku, Buyah (Murtado) dan Ibu (Amanatun), terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan dan doa yang tak putus untuk anak-anaknya;
11. Papa (Muchtar) dan Mama (Mudjiati), terima kasih sudah menjadi mertua yang selalu menyayangi dan mendukung;
12. Saudara-saudaraku tersayang, Restya, Riza, Rima dan Fajri, terima kasih telah menjadi teman berbagi yang menyenangkan. Dan untuk sepupuku, Adelia, terima kasih Butii sudah bantu jagain Attariqh selama penyelesaian tesis ini;

13. Teman-teman di Magister Ilmu Ekonomi 2015, Desita, Mbak Mayra, Fini, Tasha, Gista, Mbak Dwi, Ivo, Cici, Aldi, Sena, Bang Feri, terima kasih atas setiap kebersamaan kita yang menyenangkan, terutama untuk mbak Mayra, yang telah berjuang bersama hingga penyelesaian tesis ini.

Setiap karya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Segala kelebihan dan manfaat yang bisa diambil merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan segenap pengajar, dan segala kelemahan dalam karya ini merupakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Bandar Lampung, Januari 2019

Penulis

Reniza Helena Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian	25
D. Manfaat Penelitian	25
E. Sistematika Penulisan	25
II. TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Teoritis	27
2.1 Pertumbuhan Ekonomi	27
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	29
1. Teori Keynes	29
2.2 Subsidi	31
2.3 <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI)	37
2.3.1 Peranan <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) dalam Perekonomian	38
2.3.2 Dampak <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) terhadap Perekonomian	39
2.3.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI)	40
2.4 Tata Kelola Pemerintahan	43
2.5 Indeks Tata Kelola Pemerintahan (<i>World Governance Index</i> /WGI)	48

2.6 Indikator Tata Kelola Dunia (<i>Worldwide Government Indicators/ WGI</i>).....	50
2.6.1 <i>Government Effectiveness</i>	51
2.6.2 <i>Rule of Law</i>	53
2.6.3 <i>Regulatory Quality</i>	56
2.6.4 <i>Control of Corruption</i>	59
B. Tinjauan Empiris.....	62
C. Kerangka Pemikiran	65
D. Hipotesis	65
III. METODOLOGI PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian dan Data Penelitian	67
B. Definisi Operasional Variabel	68
C. Populasi dan Sampel Penelitian	70
D. Model Penelitian	71
E. Metode Analisis Data Panel	71
3.1 Metode <i>Pooled Least Square</i> (PLS)	72
3.2 Metode <i>Fixed Effect</i> (FEM).....	73
3.3 Metode <i>Random Effect</i> (REM)	73
F. Metode Pemilihan Model (Uji Kesesuaian Model)	74
3.1 Uji Chow.....	74
3.2 Uji Hausman	75
3.3 Uji Lagrange Multiplier	76
G. Uji Kriteria Statistik	77
3.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	77
3.2 Uji F-statistik	78
3.3 Uji t-statistik	79
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	81
A. Hasil Penelitian	81
4.1 Hasil Uji Metode Pendekatan Data Panel.....	81
4.1.1 Uji Signifikansi <i>Fixed Effect</i> (Uji Chow)	81
4.1.2 Uji Signifikansi <i>Random Effect</i> (Uji Hausman).....	82
4.1.3 Uji Signifikansi <i>Panel Least Squares</i> (Uji Breusch-Pagan LM).....	83
4.2 Uji Kriteria Statistik.....	87
4.2.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	87
4.2.2 Uji F-Statistik (Keberartian Keseluruhan)	88
4.2.3 Uji t-statistik (Keberartian Parsial)	88

B. Pembahasan.....	90
4.1 Pengaruh Subsidi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tujuh Negara ASEAN	91
4.2 Pengaruh <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tujuh Negara ASEAN	94
4.3 Pengaruh <i>Government Effectiveness</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tujuh Negara ASEAN	96
4.4 Pengaruh <i>Rule of Law</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tujuh Negara ASEAN	99
4.5 Pengaruh <i>Regulatory Quality</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tujuh Negara ASEAN	100
4.6 Pengaruh <i>Control of Corruption</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tujuh Negara ASEAN	102
4.7 Interpretasi Metode <i>Individual Fixed Effect</i>	105
C. Implikasi Hasil	112
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	115
A. Simpulan	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	123

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel	
1.1 Pertumbuhan Ekonomi ASEAN Tahun 2008-2015 (dalam persen).....	3
1.2. Subsidi di Tujuh Negara ASEAN tahun 2008-2015 (dalam persen).....	5
1.3. <i>Foreign Direct Investment</i> di Tujuh Negara ASEAN tahun 2008-2015 (persen)	10
1.4. <i>Government Effectiveness</i> di Tujuh Negara ASEAN tahun 2008-2015 (indeks)	14
1.5. <i>Rule of Law</i> di Tujuh Negara ASEAN tahun 2008-2015 (indeks)	17
1.6. <i>Regulatory Quality</i> di Tujuh Negara ASEAN tahun 2008-2015 (indeks)... ..	20
1.7. <i>Control of Corruption</i> di Tujuh Negara ASEAN tahun 2008-2015 (indeks)	22
2.1. Faktor-faktor yang membentuk <i>World Governance Index</i>	50
3.1 Deskripsi Data Input	67
4.1 Hasil Uji Chow.....	82
4.2. Hasil Uji Hausman	83
4.3. Hasil Uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM).....	84
4.4 Hasil Estimasi Data Panel dengan Pendekatan <i>Random Effect, Fixed Effect</i> dan <i>Common Effect</i>	85
4.5. Hasil Uji Regresi Dengan Pendekatan <i>Fixed Effect</i>	86
4.6 Hasil Uji F-statistik	88
4.7 Hasil Uji t-statistik	89
4.8 Hasil Interpretasi <i>Individual Fixed Effect</i>	105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar	
1.1 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan Subsidi di Tujuh Negara ASEAN... 6	
1.2 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan <i>Foreign Direct Investment</i> di Tujuh Negara ASEAN	11
1.3 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan <i>Government Effectiveness</i> di Tujuh Negara ASEAN	15
1.4 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan <i>Rule of Law</i> di Tujuh Negara ASEAN	18
1.5 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan <i>Regulatory Quality</i> di Tujuh Negara ASEAN	21
1.6 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan <i>Control of Corruption</i> di Tujuh Negara ASEAN	23
2.1 Hubungan antara <i>Marginal Cost</i> dan <i>Average Variable Cost</i>	34
2.2 <i>Subsidies Shift the Supply Curve Price</i>	36
2.3 Kerangka Pemikiran.....	66

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik	
4.1 <i>Government Effectiveness</i>	109
4.2 <i>Rule of Law</i>	110
4.3 <i>Regulatory Quality</i>	111
4.4 <i>Control of Corruption</i>	112

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran

1. Data Pertumbuhan Ekonomi, Subsidi, <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI), <i>Government Effectiveness</i> (GE), <i>Rule of Law</i> (RL), <i>Regulatory Quality</i> (RQ) dan <i>Control of Corruption</i> (CC).....	125
2. Hasil Uji <i>Common Effect</i> (CEM)	127
3. Hasil Uji <i>Fixed Effect</i>	128
4. Hasil Uji <i>Random Effect</i>	129
5. Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM Test).....	130
6. Hasil Uji Chow.....	131
7. Hasil Uji Hausman	132
8. Hasil Uji <i>Individual Fixed Effect</i>	133

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara menandakan berhasilnya pembangunan ekonomi negara tersebut. Salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB), yang merupakan total output yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun (Samuelson, 2004). PDB adalah ukuran atas nilai pasar output berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi baik tanah, tenaga kerja, dan modal yang dihasilkan suatu negara dalam periode waktu tertentu (Fair, 2004). Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari adanya globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang terjadi saat ini, sehingga menyebabkan semakin berkembangnya sistem perekonomian ke arah yang lebih terbuka antarnegara serta terjadinya proses integrasi ekonomi di berbagai wilayah dunia.

Integrasi ekonomi ASEAN dimulai sejak tanggal 8 Agustus 1967 yang meliputi bidang politik, keamanan dan ekonomi. Tujuan dari pendirian ASEAN adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bersama, mengembangkan

kebudayaan negara-negara anggotanya, menjaga stabilitas dan perdamaian serta memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk membahas perbedaan dengan damai. Menurut OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) pada tahun 2008 – 2015 adalah periode terbaik, dimana pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kerjasama ekonomi ASEAN semakin berkembang sampai dengan pembentukan *ASEAN Economic Community (AEC)* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dijadwalkan diberlakukan pada tahun 2015. Krisis ekonomi tahun 1997 lalu yang menghantam negara-negara ASEAN telah menjadi pijakan untuk membentuk kerjasama sektor keuangan di ASEAN. ASEAN memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan perdagangan, investasi dan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu wujud integrasi ekonomi di wilayah ASIA, yang akan mewujudkan pasar dan basis produksi tunggal di ASEAN yang ditandai dengan perekonomian yang sangat kompetitif serta pembangunan ekonomi yang adil dan mampu berintegrasi dengan perekonomian global (*Blueprint AEC, 2008*). Tujuan dari MEA tersebut dicantumkan dalam cetak biru (*Blueprint*) yang dimaksudkan sebagai peta jalan (*roadmap*) yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan MEA pada tahun 2015. Dalam cetak biru MEA berisi mengenai rencana aksi, target, dan kurun waktu berbagai kebijakan ekonomi menuju terwujudnya MEA, salah satunya adalah penghapusan secara substansial batasan perdagangan semua sektor pada tahun 2015. Dimana hal tersebut akan berdampak pada peningkatan perdagangan antarnegara ASEAN.

ASEAN terdiri dari 11 anggota negara yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Pertumbuhan ekonomi dari 11 anggota ASEAN dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi ASEAN Tahun 2008-2015 (dalam persen)

NO,	NEGARA	TAHUN								RATA-
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RATA
1	BRUNEI DARUSSALAM	-1,94	-1,7965	2,60	3,75	0,91	-2,126	-2,35	-0,567	2,42
2	FILIPINA	4,15	1,15	7,63	3,66	6,68	7,06	6,15	6,07	5,32
3	INDONESIA	6,01	4,63	6,22	6,17	6,03	5,56	5,01	4,88	5,56
4	KAMBOJA	6,69	0,09	5,96	7,07	7,31	7,43	7,07	7,04	6,08
5	LAOS	7,83	7,50	8,53	8,04	8,03	8,03	7,61	7,27	7,86
6	MALAYSIA	3,32	-2,526	6,98	5,29	5,47	4,69	6,01	4,97	5,25
7	MYANMAR	10,26	10,55	9,63	5,59	7,33	8,43	7,99	7,29	8,38
8	SINGAPURA	1,79	-0,603	15,24	6,22	3,87	5,00	3,57	1,93	5,37
9	THAILAND	1,73	-0,691	7,51	0,84	7,24	2,73	0,92	2,94	3,42
10	TIMOR LESTE	14,20	12,96	10,42	8,06	5,79	2,88	5,86	4,30	8,06
11	VIETNAM	5,66	5,40	6,42	6,24	5,25	5,42	5,98	6,68	5,88

Sumber: *World Bank* 2017 (diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di 11 negara ASEAN yang berfluktuatif dari tahun 2008 – 2015. Dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara ASEAN selama delapan tahun, Brunei Darussalam memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 2,42% dan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi diperoleh oleh Myanmar sebesar 8,38%. Namun dari 11 negara ASEAN, hanya ada tujuh negara ASEAN yang memiliki kelengkapan data dari tahun 2008 hingga tahun 2015 yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand sehingga dalam penelitian yang digunakan sebagai sampel data ada tujuh negara ASEAN.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi memerlukan kebijakan pemerintah termasuk kebijakan subsidi dan *Foreign Direct Investment* (FDI). Subsidi merupakan suatu kebijakan yang dapat membantu produsen dalam memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih rendah serta membantu konsumen dalam memperoleh harga barang atau jasa yang lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan. Subsidi dapat berarti mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh produsen, dimana ongkos produksi akan turun, sehingga hasil produksi meningkat dan diikuti dengan daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat. Hal ini senada dengan Omar (2016) yang menyatakan bahwa subsidi merupakan alat untuk meningkatkan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Subsidi didefinisikan sebagai tindakan pemerintah yang menurunkan biaya produksi, meningkatkan pendapatan produsen, atau menurunkan harga yang dibayarkan oleh konsumen (IEA, OECD & *World Bank*, 2010). Subsidi merupakan kebalikan dari pajak yang diterapkan pemerintah, di mana pajak menambah pendapatan negara sedangkan subsidi mengurangi pendapatan negara. Subsidi dapat menjadi bentuk proteksionisme dengan membuat barang-barang domestik dan layanan secara artifisial (buatan) kompetitif terhadap impor (<https://www.economist.com/economics-a-to-z/s#node-21529341> diakses 01 maret 2018).

Menurut Spencer dan Amos, Jr. (1993), subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi

suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Setiap negara yang memiliki kebijakan subsidi memiliki tujuan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat miskin atau usaha masyarakat agar tetap dapat menikmati pelayanan publik, pembangunan ekonomi maupun sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Subsidi adalah salah satu kebijakan fiskal pemerintah untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan (Mulyani, 2015).

Kebijakan subsidi yang diterapkan negara ASEAN berbeda-beda, hal tersebut dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai masing-masing negara dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, subsidi di negara ASEAN dapat diwakili oleh data subsidi seperti yang ditampilkan dalam Tabel 1.2, di mana perkembangan subsidi di 11 negara ASEAN diwakili oleh tujuh negara yang memiliki kelengkapan data subsidi di ASEAN.

Tabel 1.2. Subsidi di Tujuh Negara ASEAN Tahun 2008-2015 (dalam persen)

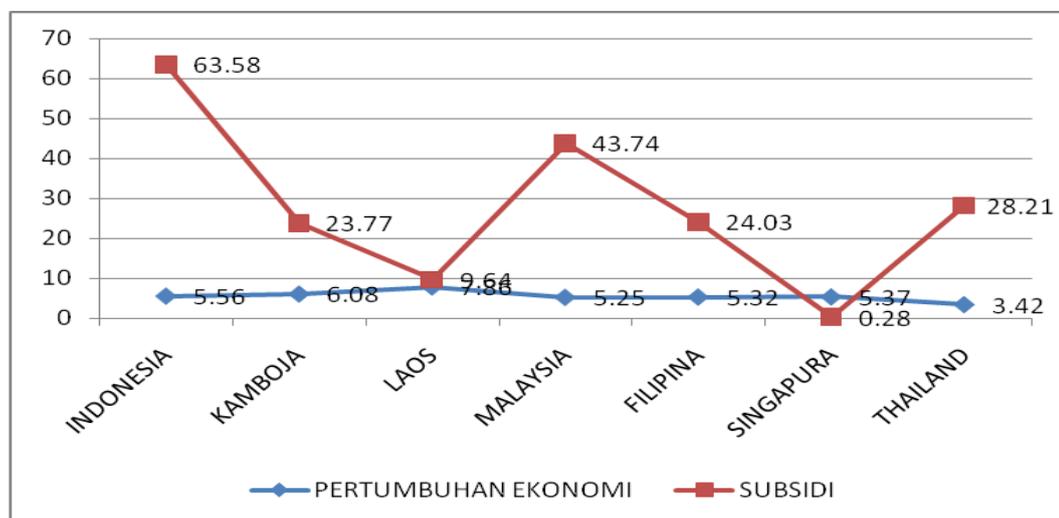
NO	NEGARA	TAHUN								RATA-
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RATA
1	INDONESIA	68,44	60,41	63,01	66,12	67,1	65,52	63,47	54,64	63,58
2	KAMBOJA	24,62	18,25	24,19	24,78	28	23,62	23,44	23,3	23,77
3	LAOS	10,11	9,97	12,57	11,97	10,96	7,08	7,12	7,37	9,64
4	MALAYSIA	46,99	45,58	41,72	45,56	44,55	44,3	42,47	38,76	43,74
5	FILIPINA	22,32	23,17	23,18	26,88	22,75	24,1	25,07	24,77	24,03
6	SINGAPURA	0,29	0,33	0,33	0,23	0,23	0,35	0,23	0,25	0,28
7	THAILAND	28,4	24,9	17,77	25,29	31,9	31,72	32,85	32,86	28,21

Sumber: *World Bank*, 2018 (diolah)

Tabel 1.2 menunjukkan rata-rata subsidi di tujuh negara ASEAN yang berfluktuatif dari tahun 2008 – 2015. Berdasarkan data pada Tabel 1.2, dapat diketahui bahwa negara yang menerapkan subsidi terbesar adalah Indonesia yaitu

sebesar 63,58%. Sedangkan untuk kebijakan subsidi terendah diterapkan oleh negara Singapura yaitu sebesar 0,28%.

Subsidi dapat berupa transfer dana secara langsung, pendanaan secara tidak langsung, pengecualian pajak, pengendalian harga, pengendalian arus perdagangan, dan pembatasan akses pasar (Wikipedia, 2018). Menurut *World Bank* (2010), subsidi ke berbagai bentuk energi dan perubahan terhadap subsidi tertentu akan sangat berharga dengan menyempurnakan pada kebijakan dan praktik terbaik dengan tipologi negara. Untuk melihat hubungan antara subsidi dan pertumbuhan ekonomi ASEAN, dapat dilihat dari Gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1.1 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan Subsidi di Tujuh Negara ASEAN

Gambar 1.1 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi dan subsidi di tujuh negara ASEAN. Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bagaimana fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan subsidi di tujuh negara ASEAN. Kebijakan subsidi yang paling tinggi diterapkan oleh negara Indonesia yaitu dengan rata-rata sebesar 63,58% dengan rata-rata tingkat pertumbuhannya sebesar 5,56%. Penerapan

kebijakan subsidi yang dilakukan oleh negara Indonesia menjadi alat untuk menentukan harga pasar yang lebih murah sehingga dapat menaikkan hasil produksi dan meningkatkan daya beli di masyarakat. Tingginya hasil produksi akan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen sehingga meningkatkan daya beli dan menumbuhkan perekonomian. Sementara itu, kebijakan subsidi yang paling rendah diterapkan oleh negara Singapura dengan rata-ratanya sebesar 0,28% dan rata-rata pertumbuhan ekonominya sebesar 5,37%. Kebijakan subsidi yang rendah diterapkan oleh Singapura mempengaruhi pertumbuhan ekonominya, di mana dengan rendahnya kebijakan subsidi maka alokasi dana pemerintah dapat digunakan untuk kebijakan lainnya sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Tinggi rendahnya kebijakan subsidi yang diterapkan di negara kawasan ASEAN memainkan peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari Gambar 1.1 juga dapat dilihat bagaimana subsidi negara Laos yang menerapkan kebijakan subsidi dengan rata-rata nilai hanya sebesar 9,64% memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang lebih tinggi yaitu sebesar 7,86% dibandingkan dengan tujuh negara ASEAN lainnya. Tingginya pertumbuhan ekonomi Laos ini didukung dengan adanya sejumlah perusahaan swasta yang berinvestasi, selain itu adanya tambang emas dan tembaga, peningkatan sektor pertanian serta pembangunan infrastruktur untuk menambah geliat perekonomian negara Laos. Kebijakan subsidi di Laos juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya kemampuan produksi dan daya beli masyarakatnya. Sedangkan Thailand dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah diantara tujuh negara ASEAN yaitu sebesar 3,42% dengan kebijakan subsidi rata-rata

sebesar 28,21%, menunjukkan bagaimana setiap kebijakan pemerintah tersebut tidak sepenuhnya direspon langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini karena adanya berbagai pendukung selain subsidi yang mampu mendorong peningkatan atau malah sebagai penyokong penurunan pertumbuhan perekonomian. Thailand dengan gejolak politik yang sering terjadi menyebabkan penerapan kebijakan ekonomi menjadi terhambat. Setiap kebijakan subsidi yang diterapkan tujuh negara ASEAN memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya Indonesia yang memiliki kebijakan subsidi paling tinggi sedangkan Singapura menerapkan kebijakan paling rendah, namun kedua negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata yang hampir sama.

Selain kebijakan subsidi, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara akan tumbuh dengan baik apabila didukung oleh kebijakan investasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri berupa investasi asing langsung. *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain (Krugman, 1999). FDI menjadi salah satu bukti bahwa perekonomian sudah semakin global dan merupakan salah satu faktor utama pendorong perekonomian negara.

Globalisasi ekonomi bagi seluruh bangsa di dunia merupakan fakta sejarah yang harus dihadapi termasuk oleh negara-negara di ASEAN. Perekonomian yang semakin global menciptakan kondisi saling ketergantungan antar negara dan berdampak pada aktivitas ekonomi yang cenderung menyatu baik di sektor riil

maupun sektor keuangan. Hal ini terjadi karena terbatasnya sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga membutuhkan bantuan atau kerjasama dari negara lain. Kondisi ekonomi yang saling terintegrasi ini menjadi jembatan bagi anggota ASEAN untuk membentuk sebuah kawasan yang memiliki dasar produksi yang luas, sehingga dapat menarik lebih banyak FDI dan memperkuat FDI serta perdagangan di kawasan Asia Timur. Hal ini dapat meningkatkan peluang untuk perusahaan domestik berpartisipasi dalam jaringan produksi regional dan global (Aldaba dan Yap, 2009). FDI memegang peranan krusial untuk menyukseskan integrasi ekonomi di ASEAN. Selain masuknya arus modal, nilai tukar mata uang asing, akses yang lebih mudah ke pasar internasional dan transfer teknologi, FDI juga dapat menjadi sebuah instrumen dalam memperkuat institusi dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil (Plummer, 2007).

Dengan adanya FDI, tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan luar negeri. Azam *et al.* (2015) dalam penelitiannya mengenai pengaruh FDI dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS), menjelaskan bahwa FDI dan ekspor berpengaruh positif dan menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dua arah dan signifikan. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa FDI dan ekspor berpengaruh positif dan signifikan sehingga menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hoang, Wiboonchutikula, dan Tubtintong (2010) mengenai pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi di Vietnam, menjelaskan bahwa FDI mempunyai

pengaruh yang rendah terhadap pertumbuhan ekonomi di Vietnam.

Perkembangan FDI di tujuh negara ASEAN dapat dilihat pada Tabel 1.3.

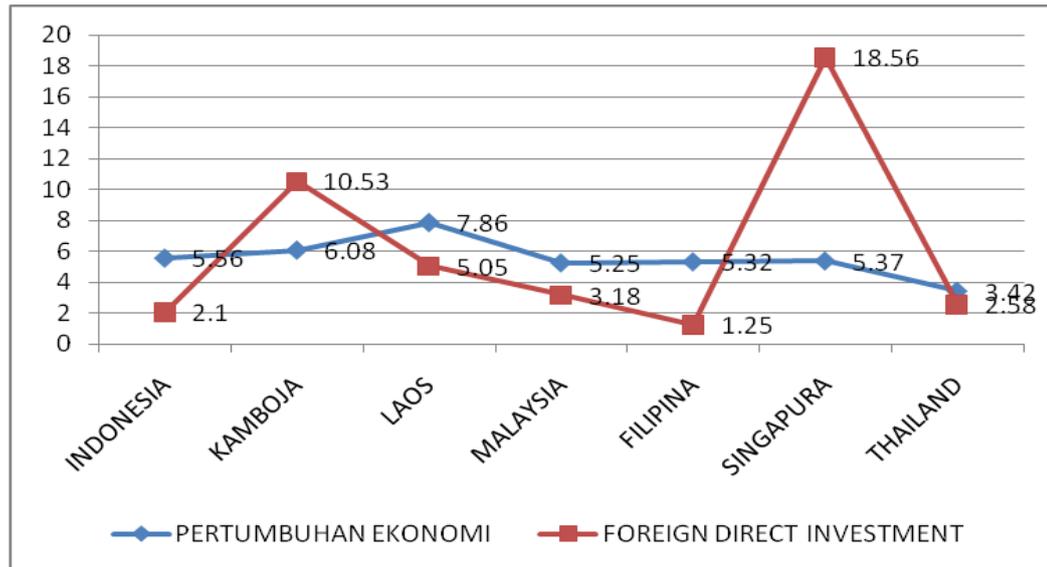
Tabel 1.3. *Foreign Direct Investment* di Tujuh Negara ASEAN tahun 2008 - 2015 (persen)

NO.	NEGARA	TAHUN								RATA-RATA
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	INDONESIA	1,71	0,84	2,02	2,3	2,3	2,55	2,81	2,29	2,10
2	KAMBOJA	7,87	8,92	11,93	10,69	13,07	12,11	10,25	9,42	10,53
3	LAOS	4,18	5,46	3,91	3,64	2,88	3,57	6,88	9,87	5,05
4	MALAYSIA	3,28	0,05	4,26	5,07	2,82	3,49	3,14	3,32	3,18
5	FILIPINA	0,76	1,22	0,53	0,89	1,28	1,37	2,016	1,92	1,25
6	SINGAPURA	6,34	12,38	23,29	17,83	19,44	21,38	24,01	23,77	18,56
7	THAILAND	2,93	2,27	4,32	0,66	3,24	3,78	1,22	2,23	2,58

Sumber: *World Bank*, 2017 (diolah)

FDI pada Tabel 1.3 di tujuh negara ASEAN menunjukkan nilai rata-rata yang berfluktuatif dari tahun 2008-2015. Untuk nilai rata-rata FDI tertinggi yaitu negara Singapura sebesar 18,56% dan nilai rata-rata FDI terendah yaitu negara Filipina sebesar 1,25% persen.

Lamsiraroj (2015) menyatakan bahwa dengan masuknya investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) maka akan terjadi transfer modal, teknologi, ilmu pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang. Terjadinya transfer tersebut akan menstimulus produktivitas serta penambahan output nasional yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara FDI dan pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini:



Gambar 1.2. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan *Foreign Direct Investment* di Tujuh Negara ASEAN

Dari Gambar 1.2 memperlihatkan bagaimana rata-rata pertumbuhan ekonomi dan FDI di tujuh negara ASEAN. FDI terendah di Filipina dengan nilai rata-rata FDI sebesar 1,25% dan pertumbuhannya 5,32%. Rendahnya FDI Filipina dipengaruhi oleh penerapan kebijakan dalam investasi yang hanya berfokus pada satu industri. Sedangkan FDI tertinggi adalah negara Singapura dengan rata-rata sebesar 18,56% dengan pertumbuhannya sebesar 5,37%, di mana tingginya FDI Singapura dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penegakan hukum yang jelas, pemerintahan yang pro-bisnis dengan pajak yang rendah dan terbuka terhadap perdagangan sehingga memudahkan para investor untuk berinvestasi. Hal ini yang akhirnya menjadi salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi di Singapura.

Selain kebijakan subsidi dan FDI, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai penunjang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan dalam penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*) ditentukan oleh

keterlibatan dan sinergi dari tiga peran utama yaitu aparaturn pemerintah, masyarakat dan pihak swasta (Agus, 2011). Konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* pertama diusulkan oleh *World Bank*, UNDP dan *Asian Development Bank* (ADB), yang kemudian dikembangkan oleh banyak pakar di negara-negara berkembang guna mewujudkan gagasan-gagasan baik menyangkut tata pemerintahan. Mengacu pada laporan *World Bank* yang ditulis oleh Kaufman, Kraay dan Zoido-Lobaton (2009), terdapat hubungan langsung antara *good governance*, *stable government* dan sosial ekonomi yang lebih baik.

Konsep tata kelola pemerintahan yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi akan menjadi bahasan menarik, jika dilihat pada kawasan yang memiliki keterlibatan kerjasama antar negara. ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) yang terletak di Asia Tenggara dipilih menjadi objek penelitian, menurut OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) pada tahun 2008 – 2015 adalah periode terbaik pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Hal ini memacu antusias negara Eropa dan China terhadap negara-negara ASEAN untuk berinvestasi lebih banyak di kawasan ASEAN.

World Bank melalui *Macroeconomics and Growth Team-Development Research Group*, sejak tahun 1996 mengeluarkan enam indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas *good governance* di tiap negara yaitu: *control of corruption*, *government effectiveness*, *political stability and absence of violence*, *regulatory quality*, *rule of law* dan *voice and accountability* (www.govindicators.org). Namun, selanjutnya menurut *World Bank* ada empat dimensi tata kelola pemerintahan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu *government effectiveness*, *rule of law*, *control of corruption* dan *regulatory quality* (*World Bank*, 2017). Setiap indikator yang dikeluarkan oleh *World Bank* menggunakan penilaian

indeks antara -2,5 sampai dengan 2,5. Dimana angka -2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* dinegara tersebut dinilai terburuk dan angka 2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* di negara tersebut dinilai terbaik.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh *government effectiveness*. Md Rafayet dkk (2017) menyatakan bahwa *government effectiveness* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. Peningkatan pada kualitas pelayanan publik dan implementasi kebijakan di suatu negara maka hal tersebut meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut Wibowo (2013) sebaliknya bahwa *government effectiveness* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa terjadi karena semakin baik dan efektif kualitas pelayanan publik suatu negara berarti pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk menerapkan kebijakan dan memberikan pelayanan publik tersebut akan semakin kecil. Sehingga dengan berkurangnya biaya yang dikeluarkan oleh kedua pihak dalam melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik, hal tersebut akan meningkatkan kualitas *government effectiveness* suatu negara. Jadi makin baik *government effectiveness* di suatu negara tersebut berarti pertumbuhannya semakin meningkat, karena pengeluaran yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan dan pelayanan publik tersebut menjadi lebih efisien. Perkembangan *government effectiveness* di tujuh negara ASEAN disajikan pada Tabel 1.4.

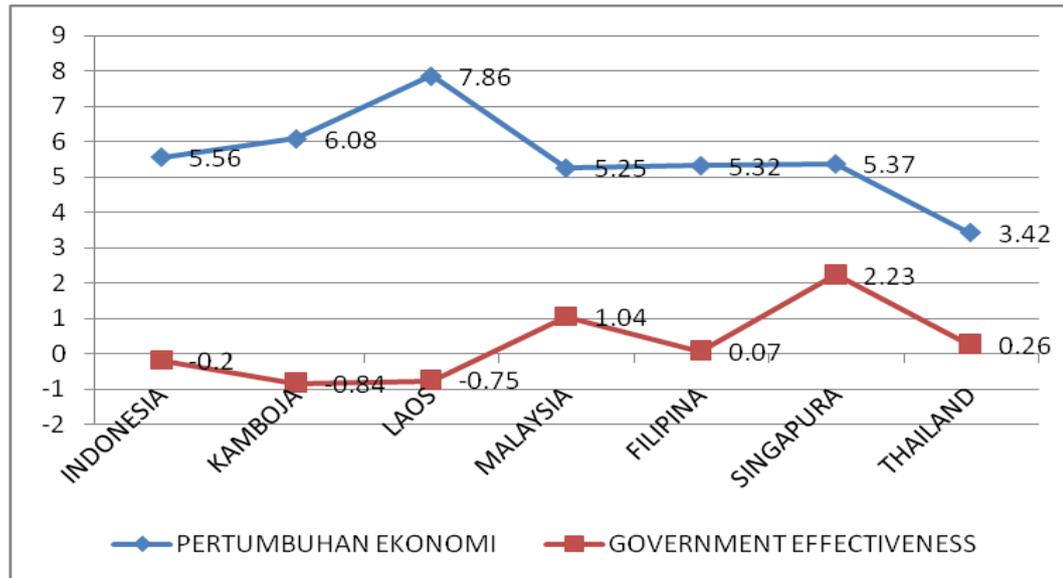
Tabel 1.4. *Government Effectiveness* di Tujuh Negara ASEAN tahun 2008-2015 (indeks)

NO.	NEGARA	TAHUN								RATA-
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RATA
1	INDONESIA	-0,23	-0,28	-0,20	-0,25	-0,27	-0,19	-0,01	-0,22	-0,20
2	KAMBOJA	-0,96	-0,91	-0,92	-0,85	-0,81	-0,91	-0,68	-0,69	-0,84
3	LAOS	-0,87	-0,96	-0,87	-0,85	-0,86	-0,73	-0,39	-0,50	-0,75
4	MALAYSIA	1,11	0,99	1,13	1,03	0,93	1,01	1,14	0,96	1,04
5	FILIPINA	0,04	-0,03	-0,02	0,08	0,11	0,12	0,19	0,11	0,07
6	SINGAPURA	2,43	2,28	2,25	2,17	2,17	2,09	2,19	2,25	2,23
7	THAILAND	0,23	0,28	0,20	0,21	0,22	0,24	0,34	0,36	0,26

Sumber: *World Bank*, 2017 (diolah)

Government effectiveness di tujuh negara ASEAN pada Tabel 1.4 berfluktuatif dari tahun ke tahun. Dapat dilihat dari rata-rata pada *government effectiveness* yang memiliki indeks nilai 2,5 dan lebih baik adalah negara Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Sedangkan yang memiliki kecenderungan *government effectiveness* dengan nilai indeks -2,5 dan kurang baik adalah negara Indonesia, Kamboja dan Laos.

Sedarmayanti (2003) menyatakan ada hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan *government effectiveness*. Hubungan antara *government effectiveness* dan pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN, dapat dilihat dari Gambar 1.3 di bawah ini:



Gambar 1.3. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan *Government Effectiveness* di Tujuh Negara ASEAN

Dari Gambar 1.3 di atas dapat dilihat bahwa efektivitas pemerintah rendah maka pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN tinggi, karena pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN bergantung pada tata kelola pemerintahannya. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan *government effectiveness* di tujuh negara ASEAN sudah berjalan dengan baik.

Government effectiveness Kamboja menunjukkan nilai terendah di tujuh negara ASEAN dengan nilai rata-rata sebesar -0,84 dan pertumbuhannya sebesar 6,08%. Hal ini menunjukkan bahwa Kamboja memiliki efektivitas pemerintah yang kurang baik yang disebabkan oleh banyak faktor dalam tata pemerintahannya, salah satunya adalah karena Kamboja pernah mengalami konflik yang menyebabkan efektivitas pemerintahnya rendah. Sedangkan *government effectiveness* terbesar yaitu Singapura dengan nilai rata-rata sebesar 2,23 dan pertumbuhannya sebesar 5,37%, dimana pertumbuhan ekonomi Singapura merupakan yang tertinggi diantara tujuh negara ASEAN. Keadaan ini

menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah Singapura sudah sangat baik, di mana Singapura termasuk negara yang kecil dengan jumlah penduduk yang tidak banyak serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik sangat membantu pemerintah dalam menjalankan tata kelola pemerintahannya dengan efektif.

Sedangkan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan aturan dalam masyarakat dan penegakan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh salah satu indikator *good governance* yaitu *rule of law*. *Rule of law* merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebab *rule of law* mampu membatasi kewenangan pemerintah agar tidak menjadi pemerintahan yang korup. Dengan penerapan *rule of law*, setiap lapisan masyarakat hingga pemerintahan akan mampu menjalankan kewenangan, hak, tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut akan menjamin pemerintahan yang bersih dan baik, yang akan mendukung laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Resnick dan Birner (2006) indikator *rule of law* mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Haggard dan Tiede (2010) juga menganalisis hubungan kausalitas antara *rule of law* dengan pertumbuhan ekonomi, mereka menemukan bahwa *rule of law* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara maju. Sementara itu, Badun (2006) melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan mempunyai efek yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel yang digunakan dalam penelitiannya tersebut adalah *quality of governance (rule of law, corruption perception index)* dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut juga sejalan dengan Edy (2013) yang menyatakan *rule of law* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap

pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa apabila terjadi peningkatan pada kepatuhan masyarakat dalam menaati peraturan dan menegakkan hukum maka akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Perkembangan *rule of law* di tujuh negara ASEAN disajikan dalam Tabel 1.5.

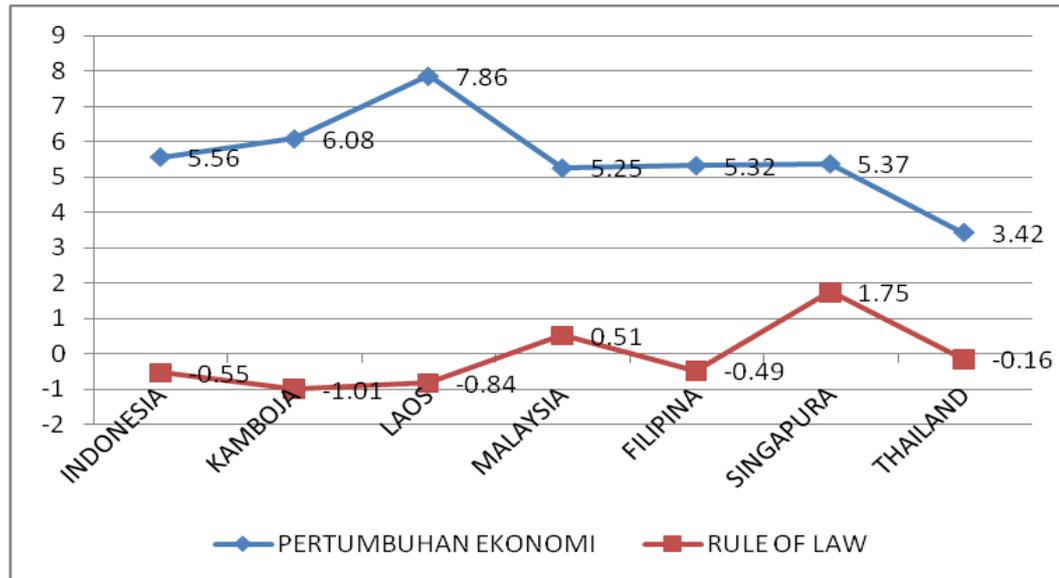
Tabel 1.5. *Rule of Law* di Tujuh Negara ASEAN tahun 2008 - 2015 (indeks)

NO.	NEGARA	TAHUN								RATA-
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RATA
1	INDONESIA	-0,66	-0,59	-0,64	-0,61	-0,59	-0,54	-0,35	-0,41	-0,55
2	KAMBOJA	-1,11	-1,09	-1,09	-1,02	-0,96	-0,98	-0,93	-0,92	-1,01
3	LAOS	-0,83	-1,00	-0,92	-0,95	-0,82	-0,76	-0,71	-0,75	-0,84
4	MALAYSIA	0,38	0,49	0,53	0,52	0,50	0,47	0,64	0,57	0,51
5	FILIPINA	-0,56	-0,60	-0,58	-0,54	-0,54	-0,42	-0,33	-0,35	-0,49
6	SINGAPURA	1,64	1,60	1,68	1,73	1,78	1,75	1,89	1,88	1,75
7	THAILAND	-0,14	-0,22	-0,20	-0,21	-0,16	-0,13	-0,15	-0,11	-0,16

Sumber: *World Bank*, 2017 (diolah)

Dari Tabel 1.5 yang menunjukkan data *rule of law* di tujuh negara ASEAN selama rentang waktu delapan tahun, di mana *rule of law* yang memiliki nilai indeks 2,5 dan lebih baik adalah Malaysia dan Singapura, sedangkan yang memiliki kecenderungan *rule of law* dengan nilai indeks -2,5 dan kurang baik adalah Indonesia, Kamboja, Laos, Filipina dan Thailand.

Rule of law memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Edy, 2013), di mana hubungan antara *rule of law* dan pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN dapat dilihat pada Gambar 1.4 di bawah ini:



Gambar 1.4. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan *Rule of Law* di Tujuh Negara ASEAN

Gambar 1.4 memperlihatkan bahwa tujuh negara ASEAN sudah menerapkan aturan hukum yang jelas, yang dapat dilihat dari indeks *rule of law*. Adanya penerapan *rule of law* yang jelas, dapat mengurangi tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Dari Gambar 1.4, dapat dilihat bahwa *rule of law* Kamboja memiliki nilai terendah di antara tujuh negara ASEAN di mana nilai rata-rata *rule of law* sebesar -1,01 dengan pertumbuhannya sebesar 6,08%. Hal ini menunjukkan bahwa Kamboja memiliki *rule of law* yang kurang baik karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang terjadi di Kamboja disebabkan karena adanya konflik yang mempengaruhi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sedangkan untuk *rule of law* terbesar yaitu Singapura dengan nilai rata-rata sebesar 1,75 dengan pertumbuhan ekonominya sebesar 5,37%. Tingginya pertumbuhan ekonomi Singapura

didukung oleh penerapan *rule of law* yang lebih baik diantara negara ASEAN lainnya karena masyarakat Singapura memiliki kesadaran hukum yang berlaku sangat tinggi, di mana setiap pelanggaran atau kesalahan akan dikenakan sanksi berupa denda.

Selain *government effectiveness* dan *rule of law*, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh indikator tata kelola pemerintahan yaitu *regulatory quality*. *Regulatory quality* dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara ASEAN, sebagaimana penemuan yang dilakukan oleh Marlina (2016) bahwa *regulatory quality* merupakan ukuran kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan dan mempromosikan pengembangan sektor swasta. Namun Wibowo (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *regulatory quality* tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebaik apa pun kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik serta peraturan dan kemampuan pemerintah dalam mengembangkan sektor swasta tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, *regulatory quality* ini masih belum dapat dijadikan tolok ukur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila para pembuat kebijakan dan *rent seeker* masih mengabaikan kepentingan masyarakat yang seharusnya lebih berhak untuk memperoleh manfaat dan keuntungan dari penerapan kebijakan tersebut. Berikut ini disajikan perkembangan *regulatory quality* di tujuh negara ASEAN.

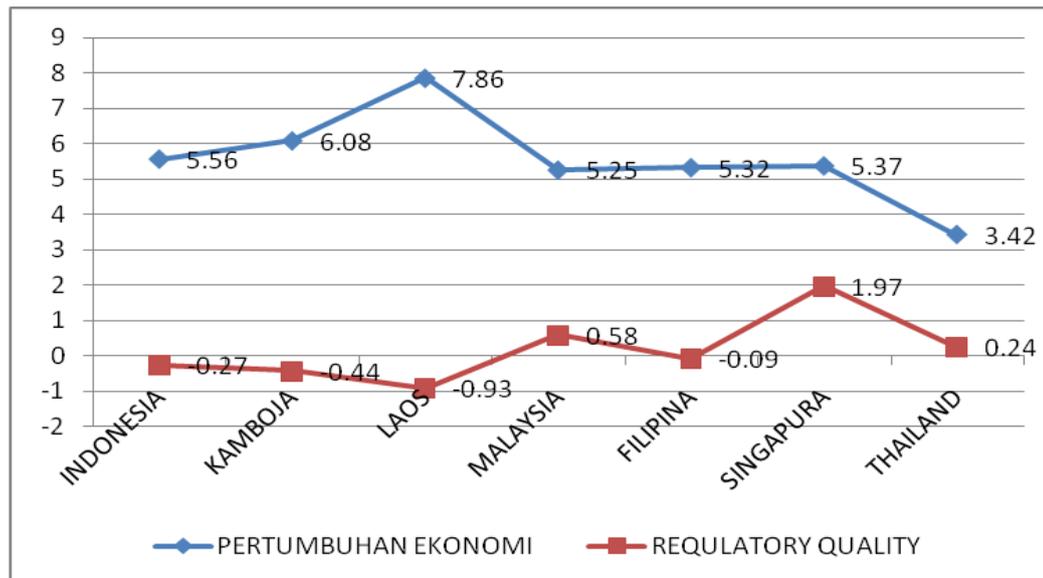
Tabel 1.6. *Regulatory Quality* di Tujuh Negara ASEAN tahun 2008 - 2015 (indeks)

NO	NEGARA	TAHUN								RATA-
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RATA
1	INDONESIA	-0,32	-0,34	-0,39	-0,33	-0,26	-0,18	-0,10	-0,21	-0,27
2	KAMBOJA	-0,44	-0,47	-0,46	-0,57	-0,34	-0,34	-0,40	-0,48	-0,44
3	LAOS	-1,13	-1,06	-1,01	-0,97	-0,82	-0,83	-0,85	-0,80	-0,93
4	MALAYSIA	0,33	0,31	0,60	0,59	0,58	0,65	0,84	0,77	0,58
5	FILIPINA	-0,06	-0,09	-0,21	-0,21	-0,05	-0,06	-0,01	-0,04	-0,09
6	SINGAPURA	1,90	1,80	1,80	1,80	1,97	1,98	2,23	2,26	1,97
7	THAILAND	0,23	0,24	0,19	0,22	0,25	0,23	0,27	0,30	0,24

Sumber: *World Bank*, 2017 (diolah)

Dari Tabel 1.6 yang menunjukkan data *regulatory quality* di tujuh negara ASEAN selama rentang waktu delapan tahun, di mana Malaysia, Singapura dan Thailand memiliki kecenderungan *regulatory quality* dengan nilai indeks 2,5 dan lebih baik. Sedangkan yang memiliki kecenderungan *regulatory quality* dengan nilai indeks -2,5 dan kurang baik adalah Indonesia, Kamboja, Laos, dan Filipina.

Seperti yang diungkapkan oleh Marlina (2016) bahwa terdapat hubungan yang positif antara *regulatory quality* dan pertumbuhan ekonomi, maka dapat dilihat hubungan keduanya di tujuh negara ASEAN dapat dilihat pada Gambar 1.5 di bawah ini:



Gambar 1.5. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan *Regulatory Quality* di Tujuh Negara ASEAN

Gambar 1.5 memperlihatkan bagaimana hubungan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN. Untuk pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, maka indeks *regulatory quality* di tujuh negara ASEAN juga harus ditingkatkan. Dari tujuh negara ASEAN, nilai indeks *regulatory quality* Laos merupakan yang terendah diantara tujuh negara ASEAN dengan nilai rata-rata sebesar -0,93 dan pertumbuhannya sebesar 7,86% menunjukkan bahwa Laos memiliki *regulatory quality* yang kurang baik. Hal ini karena kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang belum memadai di negara Laos, sehingga menghambat pertumbuhan perekonomian Laos. Sedangkan *regulatory quality* terbesar yaitu Singapura dengan nilai rata-rata sebesar 1,97 dan pertumbuhannya sebesar 5,37%. Indeks *regulatory quality* Singapura yang baik menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di negara tersebut sudah berjalan baik. Hal ini dapat terwujud karena Singapura merupakan negara kecil sehingga lebih mudah dalam mengatur tata kelola pemerintahannya.

Indikator tata kelola pemerintahan selanjutnya yang dianggap berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah *control of corruption*. Kaufman et al. dalam Huynh dan Jacho-Chávez (2009) menyatakan bahwa *control of corruption*, merupakan ukuran sejauh mana kekuasaan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan untuk melakukan tindakan korupsi. Menurut Huynh dan Jacho-Chávez (2009) *control of corruption* menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Aidt, Dutta, dan Sena (2008) juga menganalisis pengaruh antara *corruption perception index* dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa di negara yang mempunyai kualitas institusi rendah, maka korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Sanyal (2011) menyatakan *control of corruption* memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut ini disajikan perkembangan *control of corruption* di tujuh negara ASEAN.

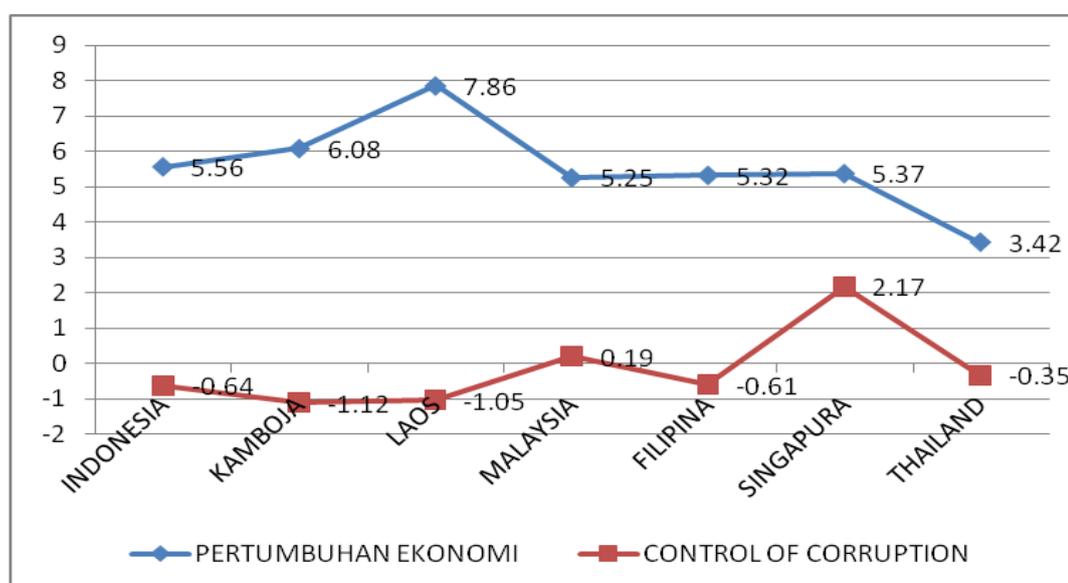
Tabel 1.7. Control of Corruption di Tujuh Negara ASEAN tahun 2008 - 2015 (indeks)

NO	NEGARA	TAHUN								RATA-RATA
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	INDONESIA	-0.56	-0.82	-0.74	-0.68	-0.66	-0.62	-0.58	-0.45	-0.64
2	KAMBOJA	-1.20	-1.16	-1.23	-1.22	-1.04	-1.01	-1.08	-1.04	-1.12
3	LAOS	-1.21	-1.26	-1.21	-1.19	-1.04	-0.89	-0.76	-0.84	-1.05
4	MALAYSIA	-0.03	-0.03	0.13	0.05	0.27	0.39	0.48	0.28	0.19
5	FILIPINA	-0.75	-0.77	-0.80	-0.70	-0.58	-0.40	-0.44	-0.43	-0.61
6	SINGAPURA	2.25	2.25	2.21	2.12	2.17	2.09	2.12	2.13	2.17
7	THAILAND	-0.40	-0.28	-0.31	-0.29	-0.34	-0.33	-0.41	-0.40	-0.35

Sumber: World Bank, 2017 (diolah)

Tabel 1.7 menunjukkan bahwa dari tujuh negara ASEAN, *control of corruption* yang memiliki nilai indeks 2,5 dan lebih baik adalah Malaysia dengan nilai indeks rata-rata 0,19 dan Singapura dengan nilai indeks rata-rata 2,17. Sedangkan yang memiliki kecenderungan *control of corruption* dengan nilai indeks -2,5 kurang baik yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Filipina dan Thailand.

Hubungan antara *control of corruption* dan pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN, maka dapat dilihat dari Gambar 1.6 di bawah ini:



Gambar 1.6. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan *control of corruption* di Tujuh Negara ASEAN

Gambar 1.6 memperlihatkan *control of corruption* yang rendah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tertinggi. Hal ini disebabkan karena *control of corruption* yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan baik, di mana dengan adanya penindakan secara hukum sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN.

Control of corruption terendah yaitu Kamboja dengan nilai rata-rata sebesar -1,12 dengan pertumbuhan ekonominya sebesar 6,08%. Hal ini menunjukkan bahwa Kamboja memiliki *control of corruption* yang kurang baik karena tidak adanya kontrol dari pemerintah sehingga tingkat korupsi semakin tinggi. Sedangkan *control of corruption* terbesar yaitu Singapura dengan nilai rata-rata sebesar 2,17 dengan pertumbuhan ekonominya sebesar 5,37%. Hal ini menunjukkan bahwa *control of corruption* Singapura sudah lebih baik diantara tujuh negara ASEAN lainnya, di mana tingginya tingkat kesadaran masyarakat diikuti dengan pengawasan serta kebijakan pemerintah yang baik membuat korupsi di Singapura jauh lebih rendah.

B. Rumusan Masalah

Kebijakan subsidi dan *Foreign Direct Investment* (FDI) diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negara yang menerapkannya. ASEAN saat ini menjadi kawasan yang menarik, karena rata-rata pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan banyaknya peluang usaha sehingga menimbulkan antusiasme bagi negara Eropa dan China untuk berinvestasi lebih banyak di kawasan ASEAN.

Berdasarkan uraian maka rumusan masalah dalam penulisan tesis ini yaitu: Bagaimana pengaruh kebijakan subsidi, *Foreign Direct Investment* (FDI), *government effectiveness*, *rule of law*, *regulatory quality* dan *control of corruption* mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2008-2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris bahwa apakah kebijakan subsidi, *Foreign Direct Investment* (FDI), *government effectiveness*, *rule of law*, *regulatory quality* dan *control of corruption* mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2008-2015.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai tata kelola pemerintahan di negara-negara ASEAN.

2. Bagi peneliti lainnya

Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari:

Bab I Pendahuluan. Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Berisikan tinjauan teoritis, tinjauan empiris, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang relevan.

Bab III Metodologi Penelitian. Terdiri dari jenis penelitian dan data penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel,

model penelitian, metode analisis data panel, uji pemilihan model, dan uji kriteria statistik.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab V Simpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2007). Perkembangan tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan PDRB pada suatu tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Budiono (1994), pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat pembangunan perekonomian suatu negara, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan output perkapita jangka panjang yang terjadi apabila ada kecenderungan (output perkapita untuk naik) yang bersumber dari proses intern perekonomian tersebut (kekuatan yang berada dalam perekonomian itu sendiri), bukan berasal dari luar dan bersifat sementara.

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Dalam bukunya *Modern Economic Growth* tahun 1966, Kuznet

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kenaikan terus menerus dalam produk perkapita atau per pekerja, seringkali diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk dan biasanya dengan perubahan struktural (Jhingan, 2004).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya (Suryana, 2002). Menurut Zaris (2003) pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto per kapita (PDRB per kapita). Samuelson (2005) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari *Gross Domestic Product* (GDP) dari suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya dan menjadi sarana utama untuk mensejahterakan penduduknya melalui pembangunan manusia. Melalui pertumbuhan ekonomi dapat dilihat bagaimana gambaran mengenai dampak suatu kebijakan pemerintah khususnya dibidang ekonomi untuk mengukur keberhasilan pembangunan dimasa yang akan datang.

Ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa (Todaro & Smith, 2006):

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk yang pada tahun-tahun berikutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi belum tentu melahirkan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (pendapatan) masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena bersamaan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi akan berlaku pula pertambahan penduduk. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi selalu rendah dan tidak melebihi tingkat pertambahan penduduk, pendapatan rata-rata masyarakat (pendapatan per kapita) akan mengalami penurunan. Sedangkan apabila dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sama dengan pertambahan penduduk, maka perekonomian negara tersebut tidak mengalami perkembangan (stagnan) dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mengalami kemajuan. Dengan demikian, salah satu syarat penting yang akan mewujudkan pembangunan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi harus melebihi tingkat pertambahan penduduk (Sukirno, 2007).

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Keynes

Teori ekonomi Keynes berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang, yang pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya

lagi belanja dan pendapatan. Pada teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika *Great Depression* melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh (wisegeek.org, 2017).

Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Keynes berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu – *laissez-faire capitalism* (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka

perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah (Kartika, 2015).

Teori Keynes mengemukakan kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong tabungan dan tidak mendorong konsumsi. Keynes juga mendukung pendistribusian kekayaan secara terkendali ketika diperlukan. Teori Keynes kemudian menyimpulkan bahwa ada alasan pragmatis untuk pendistribusian kemakmuran: jika segmen masyarakat yang lebih miskin diberikan sejumlah uang, mereka akan cenderung membelanjakannya daripada menyimpannya yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.2 Subsidi

Subsidi adalah pembayaran berbalas yang saat ini dilakukan oleh pemerintah untuk perusahaan berdasarkan tingkat aktivitas produksi, kuantitas, nilai dari barang atau jasa yang mereka produksi, jual, ekspor, atau impor, untuk mempengaruhi tingkat produksi, harga output yang dijual, atau penggajian perusahaan (IMF 2001). Subsidi juga didefinisikan sebagai tindakan pemerintah yang menurunkan biaya produksi, meningkatkan pendapatan produsen, atau menurunkan harga yang dibayarkan oleh konsumen (IEA, OECD & World Bank, 2010).

Subsidi (juga disebut subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada industri, produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi upah). Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor; subsidi di beberapa bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan; dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan mencapai swasembada produksi pangan (Todaro & Smith, 2012).

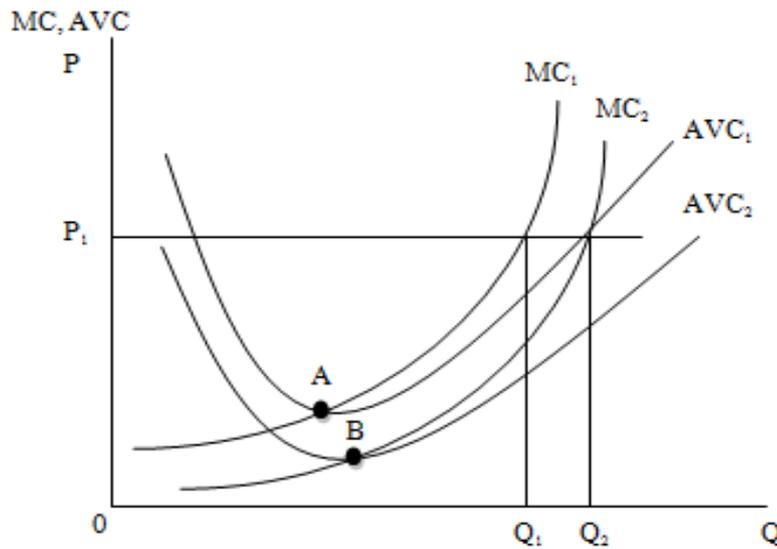
Secara umum subsidi merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada sektor ekonomi termasuk institusi, badan perniagaan atau individu. Dari perspektif ekonomi, subsidi boleh berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pembangunan. Sedangkan dari sudut pandang individu, subsidi mampu meningkatkan kesejahteraan hidup terutama kepada golongan yang berada pada tingkat perekonomian rendah (Omar, 2016). Kebanyakan negara menggunakan subsidi sebagai alat untuk membantu pertumbuhan ekonomi atau sebagai alat untuk membentuk kekayaan negara, atau kedua-duanya secara serentak. Dua sasaran utama subsidi adalah dari sudut pandang penggunaan dan pengeluaran. Melalui subsidi harga, campur tangan pemerintah di dalam pasar dengan menetapkan harga jual atas suatu barang atau jasa untuk memastikan harganya tidak terlampau mahal. Harga jual ini adalah di bawah harga keseimbangan di dalam pasar, di mana barang atau jasa tersebut merupakan kebutuhan publik. Maka manfaat subsidi harga tersebut adalah lebih kepada

objektif kesejahteraan masyarakat melalui fungsi pengumpulan kekayaan negara. Dari sudut pendapatan, subsidi biasanya merupakan pemberian keuangan secara terus menerus dari pemerintah kepada sekumpulan sasaran. Pemberian ini ada yang dalam bentuk uang atau barang atau dana yang dinilai sebagai pendapatan, seperti dana kesehatan dan pendidikan secara percuma atau harga yang rendah di bawah harga pasar.

Dari penjelasan di atas, subsidi bisa dikelompokkan menjadi subsidi kepada produsen dan subsidi kepada konsumen. Subsidi produsen adalah pemberian subsidi oleh pemerintah kepada produsen untuk meningkatkan produksi atau agar produsen terbebas dari kebangkrutan dengan cara menutup sebagian biaya produksi mereka. Subsidi konsumen adalah subsidi yang diberikan kepada konsumen dalam bentuk produk konsumsi dengan harga yang lebih murah sehingga memungkinkan mereka untuk mengkonsumsi produk tersebut.

Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen/ *supplier* terhadap produk yang dihasilkan atau dipasarkannya, dengan demikian, harga yang berlaku di pasar adalah harga yang diinginkan pemerintah yaitu harga yang lebih rendah dengan jumlah yang dapat dibeli masyarakat lebih besar. Besarnya subsidi yang diberikan biasanya tetap untuk setiap unit barang yang dihasilkan atau dipasarkan.

Untuk menjelaskan bagaimana subsidi mempengaruhi produksi, dapat dilihat dari Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Hubungan antara *Marginal Cost* dan *Average Variable Cost*

Sumber: Yuli Hariyati, 2007

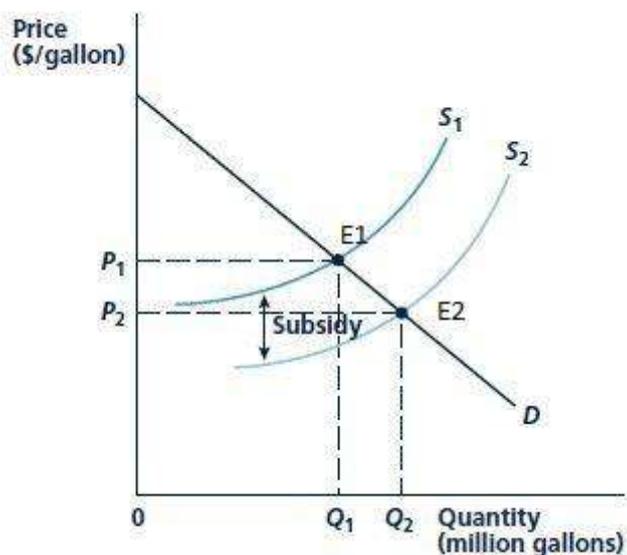
Dari Gambar 2.1 diketahui bahwa ketika suatu perusahaan memproduksi output sejumlah Q_1 dengan biaya yang dikeluarkan sebesar MC_1 dan harga yang berlaku sebesar P_1 , di mana biaya variabel rata-rata yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar AVC_1 untuk memperoleh satu satuan output. Titik keseimbangan antara biaya marjinal dan biaya rata-rata variabel berada pada titik A. Namun, ketika kebijakan subsidi diterapkan dengan harga yang sama sebesar P_1 maka perusahaan mampu memproduksi output sebesar Q_2 dengan biaya yang dikeluarkan menurun menjadi MC_2 dan biaya rata-rata variabel yang dikeluarkan untuk memperoleh satu satuan output turun menjadi AVC_2 . Hal ini menggeser titik keseimbangan dari titik A menjadi titik B (Hariyati, 2007).

Sehingga dari Gambar 2.1 tersebut dapat diketahui bagaimana subsidi memiliki peranan dalam meningkatkan jumlah output dan menciptakan harga yang berlaku. Dengan pemberian subsidi, maka produsen akan mampu memperoleh bahan baku

dengan harga yang lebih murah sehingga mampu meningkatkan hasil produksinya dan menjualnya dengan harga yang lebih murah. Hal inilah yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah permintaan sehingga akan menumbuhkan geliat ekonomi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut *World Bank* (2010), subsidi ke berbagai bentuk energi dan perubahan terhadap subsidi tertentu akan sangat berharga dengan menyempurnakan pada kebijakan dan praktik terbaik dengan tipologi negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa subsidi energi merupakan suatu kebijakan yang dapat membantu produsen dalam memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih rendah serta membantu konsumen dalam memperoleh harga barang atau jasa yang lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan.

Dengan adanya subsidi, tingkat harga yang berlaku di pasar lebih rendah. Hal ini disebabkan sebagian dari biaya-biaya untuk memproduksi dan memasarkan barang tersebut ditanggung oleh pemerintah yaitu sebesar subsidi. Grafik fungsi atau kurva penawaran sebelum dan sesudah subsidi dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini:



Gambar 2.2 *Subsidies Shift the Supply Curve Price*

Sumber: Nicholson & Snyder (2010)

Sebelum pemberlakuan subsidi keseimbangan pasar untuk permintaan barang berada pada titik E1, sedangkan titik keseimbangan pasar setelah subsidi adalah pada titik E2. Pengenaan subsidi menyebabkan perluasan permintaan dari suatu barang dan menggeser kurva penawaran jangka pendek dari S1 ke S2. Kemudian memperluas kuantitas barang yang diminta dari Q1 ke Q2 dan subsidi dibayar pada kuantitas yang lebih besar ini (Q2). Maka dari itu, total biaya subsidi tidak hanya tergantung pada jumlah barang per unit, tetapi juga pada tingkat kenaikan kuantitas yang diminta akibat penurunan harga (Nicholson & Snyder, 2010).

Tujuan utama dari adanya subsidi yaitu untuk meningkatkan konsumsi masyarakat miskin dan menjaga kelompok masyarakat miskin agar tetap dapat menikmati pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial. Pada APBN suatu negara, subsidi bertujuan untuk mengendalikan harga komoditas yang disubsidi. Dengan adanya kebijakan subsidi akan membantu negara dalam penyaluran, pengendalian

harga maupun pembatasan produksi sehingga dapat tepat sasaran dan menjadi kebijakan yang dapat membantu masyarakat sebagai konsumen maupun produsen. Dengan adanya subsidi yang diberikan pemerintah kepada produsen, diharapkan akan meningkatkan hasil produksi sehingga mampu meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan serta meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga tujuan pemberian subsidi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

2.3 Foreign Direct Investment (FDI)

Investasi asing dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni investasi asing langsung atau penanaman modal asing (*foreign direct investment*) dan investasi portofolio asing. Investasi asing langsung merupakan suatu bentuk investasi jangka panjang dimana penanam modal dari suatu negara menanamkan modal ke negara tujuannya dalam bentuk membangun, membeli total, ataupun mengakuisisi aset-aset produktif perusahaan seperti pendirian pabrik, pembelian barang modal dan bahan baku. Sedangkan, investasi portofolio asing merupakan investasi yang dilakukan melalui instrumen surat berharga, seperti saham, reksadana, obligasi dan lainnya. Investasi portofolio asing dibiayai oleh pihak asing, dimana pengoperasiannya dijalankan oleh pihak domestik.

Menurut undang-undang no 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing pada pasal 1 menyebutkan bahwa: “Pengertian modal asing dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang

digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanam modal tersebut”.

Menurut Krugman (1994), investasi asing langsung ialah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas usahanya di negara lain. Ciri yang menonjol dari penanaman modal asing langsung adalah melibatkan bukan hanya pemindahan sumber daya tetapi juga pemberlakuan pengendalian (*control*). Yakni, cabang atau anak perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban finansial kepada induk perusahaannya, namun merupakan bagian dari struktur organisasi yang sama.

Investasi asing langsung memiliki banyak kelebihan yang dimiliki investasi jenis lainnya. Pertama, investasi ini biasanya dalam jangka waktu panjang, dimana hal tersebut memberikan keuntungan secara berkala kepada investor apabila mampu mengendalikan pabrik atau perusahaannya dengan baik. Kedua, meningkatkan pendapatan riil suatu negara dengan adanya investor yang menanamkan modalnya ke dalam negeri. Ketiga, adanya penyerapan tenaga kerja apabila investor mendirikan pabrik atau perusahaan. Keempat, memberikan andil dalam memberikan pengetahuan *managerial skill* yang kompetitif dan juga pengetahuan teknologi.

2.3.1 Peranan *Foreign Direct Investment* (FDI) dalam Perekonomian

Jika ditelaah lebih dalam, FDI memiliki andil cukup besar dalam perekonomian suatu negara. Iklim investasi yang baik dalam suatu negara akan menarik investor untuk menanamkan modalnya dan akan meningkatkan perekonomian.

FDI mempunyai peran dalam perekonomian suatu negara. Pertama, modal asing dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi meningkat harus diikuti dengan struktur produksi dan perdagangan negara tersebut. Dan yang terakhir, modal asing sebagai mobilisasi dana yang mempunyai peran penting (Jhingan, 2004).

Menurut Sukirno (2000) investasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan terus menerus membuka kesempatan kerja baru, meningkatkan pendapatan nasional melalui perdagangan internasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dikarenakan terciptanya kesempatan kerja baru. Hal ini bersumber dari tiga fungsi investasi, yaitu investasi sebagai salah satu komponen dari pengeluaran agregat sehingga berakibat meningkatkan kesempatan kerja, investasi akan menambah kapasitas dari produksi, dan investasi akan diikuti dengan perkembangan teknologi yang berkembang disuatu negara.

2.3.2 Dampak *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap Perekonomian

Adanya *Foreign Direct Investment* (FDI) dalam suatu negara tidak hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian, namun juga menyumbang dampak negatif. Dampak positif dari adanya FDI antara lain menambah modal bagi pembangunan, menambah devisa negara, menambah penerimaan pajak, transfer ilmu teknologi dan manajemen *skill*, terciptanya lapangan pekerjaan, menambah jumlah permintaan produk bahan baku dalam negeri di suatu negara. Namun, pada kenyataannya dampak positif ini diiringi dengan adanya dampak negatif. Adapun dampak negatif dari FDI antara lain adanya pengelolaan sumber daya alam oleh pihak asing sering menimbulkan kerusakan lingkungan, adanya

diskriminasi pendapatan antara pegawai asing dan pegawai lokal, perusahaan asing memiliki sistem manajerial keuangan yang cenderung bersifat tertutup sehingga sulit untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak, dan lain sebagainya. Dampak positif dan negatif yang timbul dari adanya FDI tersebut dapat disikapi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah atau suatu negara serta undang-undang yang berlaku dalam menerapkan investasi asing.

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Foreign Direct Investment* (FDI)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi FDI, antara lain:

1. Tingkat Bunga

Tingkat bunga sangat berperan dalam menentukan tingkat investasi yang terjadi dalam suatu negara. Apabila tingkat bunga rendah, maka tingkat investasi akan meningkat, hal ini terjadi karena kredit bank masih menguntungkan untuk melakukan investasi. Begitu pula sebaliknya, apabila suku bunga tinggi maka investasi dari kredit bank tidak akan menguntungkan. Suku bunga merupakan faktor yang penting untuk menarik investasi, karena sebagian besar investasi dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong para investor untuk berinvestasi di suatu negara.

2. *Marginal Efficiency of Capital* (MEC)

MEC merupakan salah satu konsep yang dikeluarkan oleh Keynes untuk menentukan tingkat investasi asing yang terjadi dalam suatu perekonomian. MEC adalah tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi dilakukan (*return of investment*). Bila keuntungan yang diharapkan (MEC) lebih besar

dari tingkat suku bunga yang berlaku secara riil, maka investasi tidak akan dijalankan. Bila MEC yang diharapkan sama dengan tingkat suku bunga secara riil, maka pertimbangan untuk mengadakan investasu juga dipengaruhi oleh faktor lain.

3. Pertumbuhan Perekonomian

Ekspektasi dari adanya peningkatan pertumbuhan perekonomian di masa mendatang dalam suatu negara merupakan salah satu faktor penentu bagi investor untuk melakukan investasi atau tidak. Jika ada perkiraan akan terjadi peningkatan aktivitas perekonomian di masa mendatang, walaupun tingkat suku bunga lebih besar dari MEC, investasi masih mungkin dilakukan oleh investor yang berani berinvestasi dan melihat peluang untuk meraih keuntungan yang lebih besar.

4. Kestabilan politik suatu negara

Keadaan politik yang stabil disuatu negara akan menjadi pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi. Dengan stabilnya kondisi politik, maka investor akan merasa aman dalam menanamkan modalnya di negara tujuan investasi.

5. Keamanan suatu negara

Faktor keamanan suatu negara menjadi jaminan tersendiri dalam berinvestasi. Adanya kerusuhan atau peperangan antar suku, agama, etnis, kecemburuan sosial, dan lainnya dalam suatu negara akan membuat investor merasa tidak aman dalam berinvestasi.

6. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah yang bersifat kondusif akan berdampak positif bagi iklim investasi. Kebijakan moneter longgar (*easy monetary policy*) yang

merupakan kebijakan dari pemerintah akan ditandai dengan bunga yang rendah atau penyaluran kredit yang tinggi, dan kebijakan fiskal yang kondusif seperti adanya *tax holiday*. Tingkat pajak yang rendah (keuntungan usaha, bea masuk, pertambahan nilai) dan biaya energi (listrik dan BBM) yang murah, kemudian perizinan dan birokrasi yang mudah, cenderung berdampak positif pada investasi. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat ketat akan memberikan dampak negatif bagi investasi.

7. Infrastruktur

Iklim investasi yang kondusif juga didukung dengan adanya infrastruktur yang baik, seperti keadaan jalan, adanya pelabuhan yang memadai, tersedianya sumber energi yang dibutuhkan oleh perusahaan, tersedianya sarana transportasi dan telekomunikasi yang akan membantu dalam meningkatkan kegiatan investasi.

Terdapat dua hal yang mempengaruhi aktivitas FDI di suatu negara (*host country*), dalam kaitannya dengan mengapa suatu negara begitu aktif dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara, yaitu pertama, lingkungan atau kerangka kebijakan (*policy framework*) dan kedua, faktor ekonomi (*economic determinants*) (Rahayu, 2012).

Dalam teori Stephen Hymer menyatakan bahwa investasi langsung termasuk dalam teori persaingan tidak sempurna, dan bukan dalam teori persaingan biasa atau teori mengenai pergerakan modal secara internasional (Anorag, 1995). Hymer mengemukakan bahwa inti pokok dari penanaman modal secara langsung adalah meratakan beberapa keuntungan monopolistik yang dinikmati oleh

perusahaan induk. Dalam kajian pendekatan ini, pengembalian investasi yang lebih tinggi di luar negeri tidak menjamin kelengkapan penjelasan arus modal, karena pengembalian investasi itu sendiri berarti bahwa modal akan lebih efisien bila dialokasikan melalui pasar modal dan tidak memerlukan pemindahan perusahaan. Perolehan investasi akan tinggi jika investor memiliki keunggulan tertentu dari perusahaan yang berada dalam suatu negara, yang menjadi tujuan investasinya serta negara tersebut memiliki keunggulan dalam makroekonominya.

2.4 Tata Kelola Pemerintahan

Pertumbuhan perekonomian suatu negara saat ini bukan hanya diukur dari sisi kebijakan fiskal atau moneter saja, melainkan dilihat dari sisi pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan tata kelola pemerintahan yang mumpuni, suatu negara akan mampu mengorganisir berbagai kebijakan, bukan hanya di bidang politik, hukum, sosial atau pun kebudayaan tetapi juga dari sisi ekonomi. Adanya globalisasi yang menuntut setiap negara untuk bersaing, baik dari sistem perekonomian, pemerintahan maupun birokrasi menjadi jembatan antar daerah dan antar bangsa untuk berinteraksi secara langsung dengan lebih efisien. Suatu negara akan memiliki daya saing dalam pembangunan ekonomi apabila mampu memberikan pelayanan serta mutu ketepatan dan kepastian kebijakan publik secara efisien. Pemerintahan dianggap mampu menjalankan tata kelola dengan baik apabila tugas dan tantangan yang diberikan dapat dipenuhi secara efektif dan efisien serta dengan cara berkontribusi terhadap legitimasi kewenangan.

Orientasi dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah:

1. Orientasi Ideal, yaitu negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti: legitimasi, akuntabilitas, *securing of human rights, authonomy and devolution of power*, dan juga *assurance of civilian control*.
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif dan efisien dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan nasional. Orientasi ini bergantung sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Dalam pengertiannya bahwa pemerintah adalah merupakan salah satu unsur dari tiga unsur berdirinya sebuah negara disamping rakyat dan wilayah. Unsur pemerintah merupakan sebuah kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dengan melayani kepentingan rakyat serta bertugas/berhak menjalankan roda pemerintahandengan peraturan perundangan serta peraturan lainnya untuk mengatur rakyat dengan tujuan tercapainya kesejahteraan rakyat itu sendiri. Secara harfiah, pemerintah atau *government* dalam bahasa Inggris berarti “*the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in nation, state, city, etc*” (pengarahan dan admnisitrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam suatu negara, negara bagian, kota dan sebagainya).

Mewujudkan pemerintah yang baik diperlukan *komitmen* dari semua pihak (pemerintah dan masyarakat). Sedangkan wujud kepemerintahan yang baik(*good governance*) adalah penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggung jawab

dan efektif serta efisien dengan mensinergikan interaksi yang konstruktif diantara negara-negara.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), pemerintah yang baik (*good governance*) adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara swasta dan masyarakat. Menurut UNDP (2016), *good governance* mempunyai enam prinsip, yaitu legitimasi, hak berpendapat, transparansi dan akuntabilitas, kinerja, dan keadilan.

UNDP (1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi :

- a. Partipasi (*participation*). Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
- b. Aturan Hukum (*rule of law*). Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- c. Transparansi (*transparency*). Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi.
- d. Daya Tanggap (*responsiveness*). Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

- e. Berorientasi Konsensus (*consensus orientation*). Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsesus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
- f. Berkeadilan (*equity*). Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- g. Efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*). Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya.
- h. Akuntabilitas (*accountability*). Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik kepentingan (*stakeholders*).
- i. Visi Strategis (*strategic holders*). Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Keseluruhan karakteristik atau prinsip *good governance* tersebut saling memperkuat dan terkait serta tidak berdiri sendiri.

Menurut Laode Ida (2002), ciri-ciri *good governance* adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi.
3. Komunikasi, yakni adanya jaringan multi sistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas.
4. Proses penguatan diri sendiri (*self enforcing process*), di mana ada upaya untuk mendirikan pemerintah (*self governing*) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.
5. Keseimbangan kekuatan (*balance of forces*), di mana dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama.
6. Interdependensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi yang fasilitasi.

Pemerintahan yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, serta terbebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya; kesejahteraan spiritualnya meningkat dengan indikator rasa aman, bahagia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Pemerintahan yang

baik akan menjadi salah satu landasan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2.5 Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*World Governance Index/ WGI*)

Untuk mewujudkan *good governance* yang baik diperlukan metode untuk mengukur kapasitas *good governance* itu sendiri dengan menggunakan *Index Good Governance* (IGG) sebagai alat ukur. Pengukuran mengenai indeks tata kelola pemerintahan, khususnya yang berbasis *governance* sudah mulai dilakukan sejak tahun 1998 melalui indeks yang disusun oleh Jeff Huther dan Anwar Shah. Namun, selain indeks tersebut, sebenarnya ada sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk menyusun indeks pemerintahan berbasis *governance*. Secara umum, berbagai pendekatan tersebut membangun indikator-indikator *governance* dengan berlandaskan pada konsep *governance* yang antara lain terutama mensyaratkan adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum (*rule of law*).

Indikator yang digunakan dalam survei ini mencakup isu-isu *governance* seperti: (a) akuntabilitas; (b) partisipasi; (c) penegakan hukum; (d) keadilan; (e) responsivitas politisi; (f) tingkat KKN; dan (g) kualitas pelayanan publik. Berbeda dari model-model sebelumnya yang melakukan pengukuran *Index Good Governance* untuk tingkat pemerintah pusat (nasional), GDS melakukan pengukuran IGG untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi (Bappenas, 2008).

Tujuan dari indeks tata kelola pemerintahan yaitu:

1. Menciptakan *World Governance Index* (WGI) yang memberikan gambaran keseluruhan tata kelola dunia berdasarkan data yang diperoleh untuk 179 negara yang termasuk dalam survei. WGI menggabungkan 5 indikator, masing-masing terdiri dari 13 sub-indikator yang terdiri dari 37 indeks. Indeks ini dipilih dari database terbaik yang tersedia dan semuanya disediakan oleh sumber yang dikenal, yang terkenal dengan kualitas, keseriusan, dan keandalannya.

Tabel 2.1 Faktor-faktor yang membentuk *World Governance Index*

Indikator	Sub-Indikator	Indeks
<i>Rule of Law</i>	Badan Hukum	Ratifikasi Internasional
		Perjanjian
	Sistem yang Legal	Perlindungan Hak Milik
		Kemerdekaan
Korupsi	Efektivitas	
	Penyelesaian Sengketa	
Hak Asasi Manusia/Partisipasi	Hak Sipil dan Politik	Kontrak
		Indeks Persepsi Korupsi
	Partisipasi	Menghormati hak-hak sipil
		Menghormati hak integritas fisik
Sektor Ekonomi	Kebebasan pers	
	Kekerasan terhadap pers	
Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan	Partisipasi dalam kehidupan politik
		Proses pemilu dan pluralisme
Pembangunan Manusia	Kesejahteraan/Kebahagiaan	Budaya politik
		GDP per kapita
		Tingkat pertumbuhan GDP
		Tingkat Inflasi
		Kemudahan dalam memulai bisnis
		Pembangunan Manusia
		Kesejahteraan subyektif
		Kebahagiaan

Sumber: *World Bank*, 2017

2. Memotivasi aktor-aktor tata kelola dunia untuk mempertimbangkan WGI yang dihasilkan dan kepentingan relatif dari berbagai indikator. Ini memungkinkan mereka mengidentifikasi indikator "kunci" atau "pilot" yang akan menyiapkan kondisi untuk tata kelola dunia yang baik dan yang lebih penting, menjamin keberlanjutannya. Atas dasar situasi yang digambarkan oleh WGI dan diagnosis, seharusnya memungkinkan aktor yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk mengajukan pertanyaan yang tepat untuk mempertimbangkan solusi.

Dengan adanya indikator yang digunakan dalam pengukuran *good governance* maka pemerintah dapat melihat sejauh mana pemerintahan yang dijalankan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

2.6 Indikator Tata Kelola Dunia (*Worldwide Governance Indicators/ WGI*)

Indikator *good governance* yang baik menurut *World Bank* melalui *Macroeconomics and Growth Team-Development Research Group*, sejak tahun 1996 dalam mengukur kualitas *good governance* di tiap negara yaitu : *control of corruption, government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality, rule of law dan voice and accountability*. Setiap indikator yang dikeluarkan oleh *world bank* menggunakan penilaian indeks antara -2,5 sampai dengan 2,5. Dimana angka -2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* dinegara tersebut dinilai terburuk dan angka 2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* dinegara tersebut dinilai terbaik.

2.6.1 *Government Effectiveness*

Menurut *World Bank*, *government effectiveness* yaitu mencerminkan persepsi kualitas layanan publik, kualitas layanan sipil dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut.

Menurut MCC (*Millennium Challenge Corporation*) indikator *government effectiveness* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan faktor-faktor berikut:

1. Kompetensi pegawai negeri; implementasi keputusan pemerintah yang efektif; dan kerentanan pelayanan publik terhadap tekanan politik;
2. Kemampuan untuk mengelola alternasi politik tanpa perubahan kebijakan atau interupsi yang drastis dalam pelayanan pemerintah;
3. Fleksibilitas, pembelajaran, dan inovasi dalam kepemimpinan politik; kemampuan untuk mengkoordinasikan tujuan yang bertentangan menjadi kebijakan yang koheren;
4. Efisiensi mobilisasi pendapatan dan pengelolaan anggaran;
5. Kualitas infrastruktur transportasi, telekomunikasi, pasokan listrik, penyediaan layanan kesehatan masyarakat, dan sekolah negeri; ketersediaan layanan pemerintah online;
6. Konsistensi kebijakan; sejauh mana komitmen pemerintah dihormati oleh pemerintah baru;
7. Prevalensi birokrasi; sejauh mana penundaan birokrasi menghambat aktivitas bisnis;

8. Adanya layanan informasi dan pembayar pajak, dan mekanisme banding yang efisien dan efektif;
9. Sejauh mana:
 - a. Mekanisme koordinasi yang efektif memastikan konsistensi kebijakan lintas batas departemen, dan struktur administrasi disusun di sepanjang garis fungsional dengan sedikit duplikasi;
 - b. Proses bisnis instansi pemerintah ditinjau secara berkala untuk memastikan efisiensi pengambilan keputusan dan pelaksanaan;
 - c. Kepemimpinan politik menetapkan dan mempertahankan prioritas strategis dan pemerintah secara efektif menerapkan reformasi;
 - d. Perekrutan dan promosi di dalam pemerintahan didasarkan pada prestasi dan kinerja, dan standar etika berlaku;
 - e. RUU upah pemerintah berkelanjutan dan tidak mengherankan pengeluaran yang dibutuhkan untuk layanan publik; Tingkat gaji dan tunjangan tidak menghalangi orang-orang berbakat memasuki sektor publik; fleksibilitas (yang tidak disalahgunakan) ada untuk membayar gaji yang lebih menarik dalam posisi sulit diisi;
 - f. Pendapatan pemerintah dihasilkan oleh pajak distorsi rendah; tarif impor rendah dan relatif seragam, rabat ekspor atau kekurangan tugas bersifat fungsional; basis pajaknya luas dan bebas dari pembebasan sewenang-wenang; administrasi perpajakan efektif dan berbasis aturan; dan biaya administrasi dan kepatuhan pajak rendah;
 - g. Kebijakan dan prioritas terkait dengan anggaran; proyeksi pengeluaran multi tahun diintegrasikan ke dalam proses perumusan anggaran, dan

mencerminkan implikasi eksplisit dari implikasi dari inisiatif kebijakan baru; anggaran diformulasikan melalui konsultasi sistematis dengan kementerian pengeluaran dan legislatif, mengikuti kalender anggaran tetap; sistem klasifikasi anggaran komprehensif dan konsisten dengan standar internasional; dan pengeluaran di luar anggaran dijaga seminimal mungkin dan ditangani secara transparan;

- h. Anggaran diimplementasikan sesuai rencana, dan pengeluaran aktual hanya menyimpang dari tingkat yang direncanakan;
- i. Pemantauan anggaran terjadi sepanjang tahun berdasarkan sistem informasi manajemen yang berfungsi dengan baik; rekonsiliasi catatan perbankan dan fiskal dipraktekkan secara komprehensif, tepat, dan tepat waktu;
- j. Laporan keuangan tahun-tahun dan rekening publik disiapkan segera dan teratur dan memberikan data yang lengkap dan akurat; sejauh mana akun diaudit secara tepat waktu, profesional dan komprehensif, dan tindakan yang tepat diambil berdasarkan laporan anggaran dan temuan audit.

2.6.2 *Rule of Law*

Menurut *World Bank*, *rule of law* yaitu aturan hukum menangkap persepsi tentang sejauh mana agen memiliki kepercayaan diri dan mematuhi peraturan masyarakat, dan khususnya peraturan kualitas penegakan kontrak, hak kepemilikan, polisi, dan pengadilan, serta kemungkinan kejahatan dan kekerasan.

Rule of law merupakan satu indikator penting dalam menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik, dimana *rule of law* mampu membatasi kewenangan pemerintah agar tidak menjadi pemerintahan yang korup. Pemerintah yang patuh pada hukum dapat menjalankan tupoksi, kewenangan dan tanggung jawabnya. *Rule of law* mampu menjamin pemerintahan berjalan dengan bersih dan baik, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat membawa dampak yang luas bagi kemajuan perekonomian serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Menurut MCC (*Millennium Challenge Corporation*) indikator *rule of law* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan faktor-faktor berikut:

1. Kepercayaan publik terhadap kepolisian dan sistem peradilan; kepatuhan terhadap hukum; tradisi hukum dan ketertiban; kekuatan dan ketidakberpihakan sistem hukum;
2. Prevalensi kejahatan kecil, kejahatan kekerasan, dan kejahatan terorganisir; penculikan asing; dampak ekonomi dari kejahatan terhadap bisnis lokal; prevalensi perdagangan manusia; komitmen pemerintah untuk memerangi perdagangan manusia;
3. Sejauh mana polisi yang berfungsi dengan baik dan bertanggung jawab melindungi warga negara dan harta benda mereka dari kejahatan dan kekerasan; ketika kejahatan berat terjadi, sejauh mana mereka dilaporkan ke polisi dan diselidiki;
4. Keamanan hak milik pribadi; perlindungan kekayaan intelektual; keakuratan dan integritas dari registri properti; apakah warga negara dilindungi dari perampasan harta sewenang-wenang dan/atau tidak adil; penegakan kontrak pribadi dan kontrak pemerintah;

5. Adanya kerangka kelembagaan, hukum, dan pasar untuk kepemilikan lahan yang aman; akses yang sama terhadap tanah di antara laki-laki dan perempuan; pengelolaan sumber daya milik bersama yang efektif; hak pengguna yang adil atas sumber daya air untuk pertanian dan partisipasi lokal dalam pengelolaan sumber daya air;
6. Prevalensi penghindaran pajak dan perdagangan orang dalam; ukuran ekonomi informal;
7. Independensi, efektivitas, prediktabilitas, dan integritas peradilan; kepatuhan terhadap putusan pengadilan; jalan hukum untuk menantang tindakan pemerintah; kemampuan untuk menuntut pemerintah melalui pengadilan yang independen dan tidak memihak; kesediaan warga negara untuk menerima putusan pengadilan atas tindakan fisik dan ilegal; kepatuhan pemerintah terhadap keputusan pengadilan, yang tidak dapat berubah kecuali melalui prosedur peninjauan kembali yang telah ditetapkan;
8. Kemerdekaan jaksa dari arah dan kontrol politik;
9. Adanya kontrol sipil sipil yang efektif dan demokratis terhadap aparat kepolisian, militer, dan keamanan dalam negeri melalui cabang peradilan, legislatif, dan eksekutif; polisi, militer, dan dinas keamanan dalam negeri menghormati hak asasi manusia dan bertanggung jawab atas pelanggaran kekuasaan;
10. Ketidakberpihakan dan non diskriminasi dalam administrasi peradilan; warga negara diberi dengar pendapat yang adil, umum, dan tepat waktu oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak; warga negara berhak atas penasehat independen dan mereka yang dituduh melakukan tindak

- pidana berat diberi akses ke penasihat independen jika hal itu di luar kemampuan mereka; Cara murah tersedia untuk mengejar klaim kecil; warga negara dapat mengajukan tuntutan terhadap negara tanpa takut balas dendam;
11. Perlindungan hakim dan hakim dari campur tangan eksekutif dan legislatif; hakim ditunjuk, dipromosikan, dan dipecat dengan cara yang adil dan tidak bias; hakim dilatih secara tepat untuk melaksanakan keadilan dengan cara yang adil dan tidak bias; anggota peradilan tingkat nasional harus memberikan alasan untuk keputusan mereka; adanya ombudsman yudisial (atau badan atau mekanisme setara) yang dapat memulai penyelidikan dan menjatuhkan hukuman pada pelaku;
12. Lembaga penegakan hukum dilindungi dari campur tangan politik dan memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan mandat mereka; penunjukan ke instansi penegak hukum dilakukan sesuai kriteria profesional; aparat penegak hukum tidak kebal dari proses pidana;
13. Adanya mekanisme pelaporan independen bagi warga negara untuk mengeluhkan tindakan polisi; ketepatan waktu respon pemerintah terhadap keluhan warga tentang tindakan polisi.

2.6.3 *Regulatory Quality*

Menurut *World Bank*, *regulatory quality* merupakan kualitas regulasi yang menangkap persepsi kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan dan peraturan yang baik mengizinkan dan mempromosikan pembangunan sektor swasta. Menurut OECD (*Organisation For Economic Co-Operation and Development*), kualitas sistem peraturan suatu negara sangat

bergantung pada bagaimana caranya peraturan disusun dan dibuat. Pemerintah berkepentingan untuk memastikan bahwa peraturan mereka beroperasi secara efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial kesejahteraan dan standar lingkungan.

Menurut MCC (*Millennium Challenge Corporation*) indikator *regulatory quality* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan faktor-faktor berikut:

1. Prevalensi peraturan dan persyaratan administratif yang memberatkan bisnis; kemudahan memulai dan menutup bisnis baru; kemudahan mendaftarkan properti;
2. Intervensi pemerintah dalam ekonomi; sejauh mana subsidi pemerintah membuat industri yang tidak kompetitif hidup;
3. Kebijakan pasar tenaga kerja; undang-undang ketenagakerjaan memberikan keleluasaan dalam mempekerjakan dan pemecatan; kontrol upah dan harga;
4. Kompleksitas dan efisiensi sistem perpajakan; kebijakan pajak pro-investasi;
5. Kebijakan perdagangan; ketinggian hambatan tarif; jumlah band tarif; stabilitas tarif; sejauh mana hambatan non-tarif digunakan; transparansi dan prediktabilitas rezim perdagangan;
6. Daya tarik investasi; prevalensi larangan atau persyaratan perizinan investasi; peraturan keuangan tentang investasi dan modal asing; pembatasan legal atas kepemilikan bisnis dan ekuitas oleh bukan penduduk; peraturan mata uang asing; ketidakpastian umum tentang biaya regulasi; peraturan hukum lembaga keuangan; sejauh mana kebijakan nilai tukar menghambat daya saing perusahaan;

7. Kelengkapan aturan hukum dan efektifitas peraturan perundang-undangan di sektor perbankan dan sekuritas; biaya peraturan, undang-undang, atau kebijakan pemerintah yang tidak pasti;
8. Kekuatan sistem perbankan; adanya hambatan memasuki sektor perbankan; kemudahan akses ke pasar modal; perlindungan bank domestik dari persaingan asing; apakah suku bunga sangat diatur; biaya transfer yang terkait dengan modal ekspor;
9. Partisipasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur; dominasi perusahaan milik negara; keterbukaan kontrak sektor publik terhadap investor asing; tingkat persaingan pasar; efektivitas kebijakan dan undang-undang persaingan dan anti-*trust*;
10. Adanya kerangka kebijakan, hukum, dan kelembagaan yang mendukung pengembangan sektor keuangan pedesaan berbasis pasar yang efisien, adil, dan dapat diakses oleh penduduk berpendapatan rendah di daerah pedesaan;
11. Penerapan kerangka kebijakan, hukum, dan peraturan yang tepat untuk mendukung kemunculan dan pengembangan sektor usaha pedesaan swasta yang efisien; penetapan prosedur sederhana, cepat dan transparan untuk membangun usaha agribisnis swasta;
12. Adanya kerangka kebijakan, hukum, dan kelembagaan yang mendukung pengembangan dan liberalisasi pasar pertanian berbasis komersial (untuk input dan produksi) yang beroperasi secara liberal dan sektoral, efisien secara fungsional dan adil, dan dapat diakses. untuk petani kecil; dan
13. Sejauh mana:

- a. Undang-undang tata kelola perusahaan mendorong kepemilikan dan pengungkapan keuangan dan melindungi hak pemegang saham, dan umumnya diberlakukan;
- b. Intervensi negara di pasar barang dan lahan umumnya terbatas pada peraturan dan undang-undang untuk memperlancar ketidaksempurnaan pasar;
- c. Layanan pabean bebas dari korupsi, beroperasi secara transparan, bergantung pada manajemen risiko, memproses koleksi tugas, dan mengembalikan uang segera; dan
- d. Undang-undang, peraturan, dan pedoman perdagangan diterbitkan, disederhanakan, dan dirasionalisasi.

2.6.4 *Control of Corruption*

Menurut *World Bank*, *control of corruption* yaitu mencakup beberapa indikator untuk mengukur persepsi sejauh mana publik kekuasaan dilakukan untuk keuntungan pribadi, termasuk keduanya kecil dan bentuk korupsi yang besar, dan juga seperti "penangkapan" negara oleh elit dan kepentingan pribadi (Kaufmann et al. 2010). Menurut MCC (*Millenium Challenge Corporation*), indikator ini mengukur sejauh mana kekuasaan publik dilaksanakan untuk swasta, termasuk bentuk korupsi kecil dan besar, serta "penangkapan" negara oleh elit dan kepentingan pribadi. Ini juga mengukur kekuatan dan efektivitas kerangka kebijakan dan kelembagaan suatu negara untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Menurut MCC (*Millennium Challenge Corporation*) indikator *control of corruption* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan faktor-faktor berikut:

1. Prevalensi korupsi besar dan korupsi kecil di semua tingkat pemerintahan;
2. Efek korupsi terhadap "daya tarik" suatu negara sebagai tempat berbisnis;
3. Frekuensi "pembayaran tidak teratur" yang terkait dengan izin impor dan ekspor, kontrak publik, utilitas publik, penilaian pajak, dan keputusan pengadilan;
4. Nepotisme, kronisme dan patronase dalam dinas sipil;
5. Perkiraan biaya penyuapan sebagai bagian dari penjualan tahunan perusahaan;
6. Keterlibatan pejabat terpilih, pejabat perbatasan, petugas pajak, hakim, dan hakim dalam korupsi;
7. Kekuatan dan efektivitas undang-undang, kebijakan, dan institusi anti-korupsi pemerintah;
8. Kepercayaan publik terhadap kejujuran keuangan politisi;
9. Sejauh mana:
 1. Proses diajukan untuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi di tingkat lokal;
 2. Otoritas pemerintah memantau prevalensi korupsi dan menerapkan sanksi secara transparan;
 3. Konflik kepentingan dan peraturan etika untuk pegawai negeri diamati dan ditegakkan;
 4. Deklarasi pendapatan dan aset pejabat publik harus diverifikasi dan terbuka untuk umum dan dicermati oleh media;

5. Pejabat senior pemerintah kebal dari tuntutan hukum berdasarkan hukum karena penyimpangan;
6. Pemerintah menyediakan korban korupsi dengan mekanisme yang memadai untuk mengejar hak-hak mereka;
7. Administrator pajak menerapkan sistem audit internal yang efektif untuk memastikan akuntabilitas pengumpulan pajak;
8. Proses pembuatan anggaran eksekutif bersifat komprehensif dan transparan dan tunduk pada tinjauan dan pengawasan legislatif yang berarti;
9. Pemerintah memastikan transparansi, penawaran terbuka, dan persaingan efektif dalam pemberian kontrak pemerintah;
10. Ada perlindungan hukum dan fungsional untuk *whistleblower*, aktivis anti-korupsi, dan penyidik;
11. Tuduhan korupsi di tingkat nasional dan lokal diselidiki dan diadili dengan seksama tanpa prasangka;
12. Pemerintah bebas dari peraturan birokrasi yang berlebihan, persyaratan pendaftaran, dan kontrol lainnya yang meningkatkan peluang terjadinya korupsi;
13. Warga negara memiliki hak hukum atas informasi tentang operasi pemerintah dan dapat memperoleh dokumen pemerintah dengan biaya nominal.

B. Tinjauan Empiris

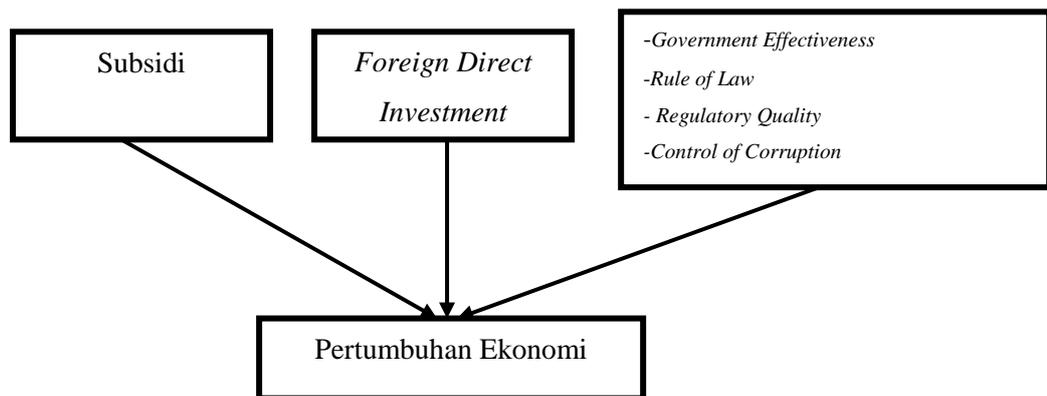
No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat	Hasil Penelitian
1.	K.A Hamid dan Z.A Rashid (2012)	<i>Economic Impacts of Subsidy Rationalization Malaysia</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Rasionalisasi subsidi 	<i>Leontief</i> dan <i>CGE</i>	Input energi murah dan penundaan dalam rasionalisasi subsidi merupakan ancaman signifikan bagi daya saing ekonomi berkelanjutan di kawasan Malaysia.
2.	World Bank Group (2010)	<i>Subsidies in the Energy Sector: An Overview</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Subsidi 		Subsidi ke berbagai bentuk energi dan melakukan perubahan subsidi tertentu akan sangat berharga dengan menggunakan kebijakan tipologi.
3.	Asian Development Bank (2016)	<i>Fossil Fuel Subsidies In ASIA Trends, Impact, and Reforms</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Subsidi • GDP 		Realokasi subsidi ke rumah tangga dapat mengurangi dampak reformasi negatif awal pada rumah tangga, terutama masyarakat miskin. Program jaring pengaman sosial di India, Indonesia, dan Thailand tidak cukup untuk mendukung reformasi subsidi bahan bakar fosil.
4.	Z. Omar dan F.P Kanan	<i>Ke Arah Subsidi Sebagai Alat Pembangunan ekonomi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Subsidi • Pendapatan • Pertumbuhan Ekonomi 		Subsidi merupakan alat untuk meningkatkan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5.	Abdulghader Ali (2014)	<i>The Impact of Foreign direct investment (FDI) on economic growth in Algeria</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • FDI 	ANOVA	Investasi domestik dan impor tidak signifikan sedangkan FDI berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Algeria.
6.	Lamsiraroj dan Doucoulios (2015)	<i>Does Growth Attract FDI?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • FDI • Tarif pajak 	Meta Analysis	FDI menyebabkan adanya transfer modal, teknologi dan ilmu pengetahuan yang akan menstimulus produktivitas serta penambahan output nasional sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat.
7.	Kevin H. Zhang	<i>Foreign Direct Investment and</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Foreign Direct Investment</i> 	Data Panel	FDI mendorong pertumbuhan pendapatan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat	Hasil Penelitian
	(2006)	<i>Economic Growth in China : A Panel Data Study for 1992-2004</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 		negara, dan efek pertumbuhan positif ini meningkat dari waktu ke waktu.
8.	Marlina Lumban Gaol (2016)	Pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • <i>Good governance</i>(<i>control of corruption, government effectiveness, political stability and absence violence, regulatory quality, rule of law dan voice and accountability</i>) 	Data panel dengan FEM	<i>Control of corruption, government effectiveness, rule of law, dan voice and accountability</i> tidak signifikan sedangkan <i>political stability and absence violence</i> dan <i>regulatory quality</i> berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN.
9.	Edy Wibowo (2013)	Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • <i>Voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption</i> 	Data panel	<i>Government effectiveness</i> dan <i>rule of law</i> berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
10.	Haggard dan Tiede (2010)	<i>The Rule of Law and Economic Growth: Where Are We?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • <i>Corruption</i> • <i>Rule of law</i> 	Panel Data	Adanya hubungan kausalitas antara <i>rule of law</i> dengan pertumbuhan ekonomi, <i>rule of law</i> mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara maju.
11.	Md Rafayet (2017)	<i>Government Effectiveness</i> dan Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • <i>Government Effectiveness</i> 	<i>System Generalized Method of Moments</i> (System GMM).	<i>Government effectiveness</i> berpengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
12.	Yilmaz Bayar (2016)	<i>Public Governance And Economic Growth In The Transitional Economies Of The European Union</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • <i>Voice and accountability, political stability and the absence of</i> 	Panel data	<i>Regulatory quality</i> memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga <i>control of corruption</i> dan <i>rule of</i>

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat	Hasil Penelitian
			<i>violence/terrorism, government effectiveness, regulatory quality, rule of law and control of corruption</i>		<i>law</i> memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, sementara <i>political stability</i> memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
13.	Daniel Kaufman, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi (2005)	<i>Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Worldwide Governance Indicators (WGI)</i> • <i>Voice and Accountability, Political Stability and Absence of Violence/Terrorism, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, dan Control of Corruption.</i> 		Kualitas tata kelola di sejumlah negara telah berubah secara signifikan (di kedua arah), memberikan bukti yang menunjukkan bahwa tidak ada kecenderungan, untuk keadaan yang lebih baik atau lebih buruk, dalam rata-rata global pemerintahan.

C. Kerangka Pemikiran

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel subsidi, *Foreign Direct Investment* (FDI), *government effectiveness*, *rule of law*, *regulatory quality* dan *control of corruption* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.



Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih perlu diuji kebenarannya melalui data-data yang diperoleh, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga subsidi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama tahun 2008-2015.
2. Diduga *Foreign Direct Investment* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama tahun 2008 – 2015.

3. Diduga *government effectiveness* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama tahun 2008 - 2015.
4. Diduga *rule of law* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama tahun 2008 -2015.
5. Diduga *regulatory quality* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama tahun 2008 -2015.
6. Diduga *control of corruption* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama tahun 2008 -2015.
7. Diduga subsidi, *Foreign Direct Investment (FDI)*, *government effectiveness*, *rule of law*, *regulatory quality* dan *control of corruption* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara- negara ASEAN selama tahun 2008 - 2015.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Data Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *World Bank*. Di mana data penelitian akan diolah menggunakan teknik data panel yang merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Dalam penelitian ini, data *cross section* yang digunakan adalah data negara ASEAN dengan *time series* periode 2008 sampai 2015. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Subsidi, *Foreign Direct Investment*, *Government Effectiveness*, *Rule of Law*, *Regulatory Quality* dan *Control of Corruption*. Deskripsi tentang satuan pengukuran, jenis dan sumber data dirangkum dalam Tabel 3.1 dan data input disajikan dalam lampiran.

Tabel 3.1. Deskripsi Data Input

Jenis Variabel	Satuan Pengukuran	Selang Periode Runtun Waktu	Sumber Data
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	Tahun	World Bank
Subsidi	Persen	Tahun	World Bank
<i>Foreign Direct Investment</i>	Persen	Tahun	World Bank
<i>Government Effectiveness</i>	Indeks	Tahun	World Bank
<i>Rule of Law</i>	Indeks	Tahun	World Bank
<i>Regulatory Quality</i>	Indeks	Tahun	World Bank
<i>Control of Corruption</i>	Indeks	Tahun	World Bank

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi (Y)

$$\text{Rumus} = \left(\frac{GDP_t - GDP_{t-1}}{GDP_{t-1}} \right) \times 100\%$$

Dimana : GDP_t = *Gross Domestic Product* H konstan tahun t
 GDP_{t-1} = GDP harga konstan sebelum tahun t

(McEachern, 2001)

2. Subsidi (X_1), kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana merupakan persentase dari subsidi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Indikator subsidi menurut *World Bank* adalah subsidi dan transfer lainnya (persentase biaya). Sumbernya yaitu subsidi, hibah, dan tunjangan sosial lainnya termasuk semua yang tidak terbalas, transfer yang tidak dapat dibayarkan pada rekening giro kepada perusahaan swasta dan publik; hibah kepada pemerintah asing, organisasi internasional dan unit pemerintah lainnya, dan jaminan sosial, tunjangan bantuan sosial dan tunjangan sosial pekerja secara tunai dan dalam bentuk barang.
3. *Foreign Direct Investment* (FDI) (X_2) merupakan variabel yang mempresentasikan penanaman modal asing langsung. Di mana nilai FDI merupakan persentase nilai FDI *inflow* suatu negara selama satu tahun dibagi nilai GDP tahunan.

4. Indikator Tata Kelola Pemerintahan (*World Governance Indicators*)
 - a. *Government Effectiveness* (X_3), ukuran kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan sipil dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. *Government Effectiveness* diukur dengan menggunakan penilaian indeks antara -2,5 sampai dengan 2,5. Di mana angka -2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap *good governance* di negara tersebut dinilai terburuk dan angka 2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* di negara tersebut dinilai terbaik (Kaufmann, 2010).
 - b. *Rule of Law* (X_4), ukuran sejauh mana seseorang mematuhi aturan masyarakat dan menegakkan hukum. *Rule of Law* diukur dengan menggunakan penilaian indeks antara -2,5 sampai dengan 2,5. Di mana angka -2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap *good governance* di negara tersebut dinilai terburuk dan angka 2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* di negara tersebut dinilai terbaik (Kaufmann, 2010).
 - c. *Regulatory Quality* (X_5), yaitu ukuran kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan dan kemampuan mempromosikan pengembangan sektor swasta. *Regulatory Quality* diukur dengan menggunakan penilaian indeks antara -2,5 sampai dengan 2,5. Di mana angka -2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap *good governance* di negara tersebut dinilai terburuk dan angka 2,5 menunjukkan bahwa

prestasi dari setiap indikator *good governance* di negara tersebut dinilai terbaik (Kaufmann, 2010).

- d. *Control of Corruption* (X_6), yaitu ukuran sejauh mana kekuasaan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan untuk melakukan tindakan korupsi. *Control of Corruption* diukur dengan menggunakan penilaian indeks antara -2,5 sampai dengan 2,5. Di mana angka -2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap *good governance* di negara tersebut dinilai terburuk dan angka 2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* di negara tersebut dinilai terbaik (Kaufmann, 2010).

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Menurut Sugiyono (2011), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/ objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah 11 negara ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste dan Vietnam. Sedangkan sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini digunakan metode *Non Probability Sampling* dengan teknik *purposive sampling* yang digunakan untuk pengambilan sampel di mana metode penetapan sampel dengan cara menentukan target dari elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya (Sugiyono, 2011). Berdasarkan hal tersebut, syarat

pemilihan sampel yang digunakan yaitu kelengkapan data dari variabel subsidi, FDI, *government effectiveness*, *rule of law*, *regulatory quality* dan *control of corruption*, sehingga yang menjadi sampel penelitian adalah tujuh negara ASEAN yang diwakili oleh Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand yang memiliki kelengkapan data yang digunakan dari tahun 2008-2015.

D. Model Penelitian

Model ekonometrika yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh subsidi, tata kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN yaitu:

$$Y = \alpha + \alpha_1 SUB_{it} + \alpha_2 FDI_{it} + \alpha_3 GE_{it} + \alpha_4 RL_{it} + \alpha_5 RQ_{it} + \alpha_6 CC_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

Y	=	Pertumbuhan Ekonomi (%)
SUB	=	Subsidi (%)
FDI	=	<i>Foreign Direct Investment</i> (%)
GE	=	<i>Government Effectiveness</i> (indeks)
RL	=	<i>Rule of Law</i> (indeks)
RQ	=	<i>Regulatory Quality</i> (indeks)
CC	=	<i>Control of Corruption</i> (indeks)
α_1	=	Koefisien
α	=	Intercept
i	=	Periode
t	=	Negara

E. Metode Analisis Data Panel

Data panel menurut Gujarati (2003) merupakan suatu data *cross section* (individu/sektor) yang disusun berdasarkan runtun waktu (*time series*). Menurut Baltagi (2005), beberapa keuntungan menggunakan data panel sebagai berikut :

1. Data panel mampu mengakomodasi tingkat heterogenitas variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam model (*unobserved individual heterogeneity*).
2. Data panel mampu mengurangi kolinearitas antar variabel.
3. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu karena unit data lebih banyak.

Terdapat beberapa metode yang sesuai dengan asumsi pada struktur *varians-covarians* yaitu struktur homoskedastik dan ada *cross sectional correlation* (*Seemingly Uncorrelated Regression / SUR*) dan asumsi adanya autokorelasi antar waktu pada *error term*. Jika memilih *cross-sectional SUR*, *Eviews* memperkirakan spesifikasi GLS yang layak yang mengoreksi heteroskedastisitas dan korelasi kontemporer. Demikian pula, bobot periode memungkinkan untuk heteroskedastisitas periode, sedangkan periode SUR mengoreksi heteroskedastisitas dan korelasi pengamatan umum dalam *cross-section*. Spesifikasi SUR adalah contoh dari apa yang terkadang disebut sebagai *Parks Estimator* (*Eviews Help*).

Terdapat tiga pendekatan dalam perhitungan model data panel, yaitu:

3.1 Metode *Pooled Least Square* (PLS)

Pendekatan *Pooled Least Square* ini menggunakan metode OLS biasa. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana yang memiliki intersep dan *slope* yang konstan. Model *Pooled Least Square* dapat didefinisikan ke dalam model berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + X_{it}\beta_i + u_{it}$$

Dimana i merupakan negara yang diobservasi pada data *cross-section*, merupakan periode pada data *time-series*. Pendekatan ini memiliki keterbatasan karena diasumsikan intersep dan *slope* dari setiap variabel dinyatakan konstan untuk setiap negara yang diobservasi.

3.2 Metode *Fixed Effect* (FEM)

Pada metode *Fixed Effect Model*, intersep dapat dibedakan antar individu karena setiap individu dianggap mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam membedakan intersepanya dapat digunakan peubah *dummy*, sehingga metode ini juga dikenal dengan model *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Persamaan dalam model ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + u_{it}$$

Dimana β_{0i} merupakan intersep dan β_1, β_2 merupakan *slope*. Adanya perbedaan intersep pada setiap unit *cross section* dilakukan dengan penambahan *subscript i*. Meskipun intersep berbeda antar negara namun intersep masing-masing negara tidak berbeda antar waktu, yang disebut *time invariant*.

3.3 Metode *Random Effect* (REM)

Pendekatan *Random Effect Model*, intersep tidak lagi dianggap konstan, melainkan dianggap sebagai peubah *random*. Nilai intersep dari masing-masing individu dapat dinyatakan sebagai:

$$\beta_{0i} = \beta_0 + e_i ; \text{ dengan } i = 1, 2, \dots, n$$

dimana e_i adalah sisaan acak (*error term*) dengan rata-rata = 0 dan ragam = σ^2 .

Sehingga persamaan dalam model ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it} + u_i$$

F. Metode Pemilihan Model (Uji Kesesuaian Model)

Untuk menentukan metode apa yang akan digunakan dalam penelitian, maka dilakukan uji kesesuaian model melalui tiga metode pada teknik estimasi model data panel, yaitu:

3.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih teknik dengan metode *Pooled Least Square* atau *Fixed Effect Model*. Pengujian ini dikenal dengan istilah uji *Chow* atau *Likelihood Test Ratio*.

Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : model *pooled least square*

H_1 : model *fixed effect*

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol tersebut adalah dengan menggunakan *F-statistic* seperti dirumuskan oleh Chow (1967):

$$Chow = \frac{\frac{RRSS - URSS}{N - 1}}{\frac{URSS}{NT - N - K}} \sim F$$

$\alpha(N - 1, NT - N - K)$

(Baltagi, 2005)

Dimana:

RRSS : *Restricted Residual Sum Square (Sum Square Residual Pooled Least Square)*

URSS : *Unrestricted Residual Sum Square (Sum Square Residual Fixed Effect Model)*

N : jumlah data *cross-section* (individu)

T : jumlah data *time-series* (periode waktu)

K : jumlah variabel independen

Pengujian ini mengikuti distribusi F dimana perbandingan yang dipakai apabila nilai F-statistik > F tabel atau nilai probabilitas $F < \alpha$ 0,05 pada tingkat signifikansi tertentu maka cukup bukti untuk tolak hipotesis nol (H_0), yang berarti asumsi koefisien intersep dan *slope* konstan tidak berlaku, sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

3.2 Uji Hausman

Uji Hausman berperan dalam memilih model *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang lebih baik, dapat pula dilakukan pengujian terhadap asumsi ada atau tidaknya korelasi antara regresor dan efek individu. Untuk menguji asumsi ini dapat digunakan *Hausman Test*. Dalam uji ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : E(\tau_{x_{it}}) = 0$; maka *Random Effect Model* adalah model yang tepat,

$H_1 : E(\tau_{x_{it}}) \neq 0$; maka *Fixed Effect Model* adalah model yang tepat.

Sebagai dasar penolakan H_0 maka digunakan statistik *Hausman* dan membandingkannya dengan *Chi square*. Statistik *Hausman* dirumuskan dengan:

$$H = (\beta_{REM} - \beta_{FEM})' (M_{FEM} - M_{REM})^{-1} (\beta_{REM} - \beta_{FEM})^2 \sim \chi^2(k)$$

(Baltagi, 2005)

Keterangan :

β : vektor statistik

M : matriks kovarian

Jika nilai H hasil pengujian lebih besar dari *Chi-Square* (χ^2) tabel atau nilai probabilitas $> \alpha$ 0,05 maka sudah cukup bukti untuk tolak H_0 sehingga model yang digunakan adalah model *Fixed Effect Model*, begitu pula sebaliknya.

3.3 Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model *Random Effect* atau model *Common Effect* (PLS) yang paling tepat digunakan. Uji signifikansi *Random Effect Model* (REM) ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode Breusch Pagan untuk uji signifikansi *random effect* didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai berikut : (Silalahi, 2014).

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left(\frac{\sum_i^n = 1 [\sum_t^T = 1 e_{it}]^2}{\sum_i^n = 1 \sum_t^T = 1 e_{it}^2} - 1 \right)^2$$

Dimana:

n = Jumlah individu

T = Jumlah periode waktu

e = Residual metode *Common Effect* (PLS)

Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : Model *Common Effect*

H_1 : Model *Random Effect*

Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik *chi-squares* maka H_0 ditolak, yang artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *Random Effect* dari pada metode *Common Effect*. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik *chi-squares* sebagai nilai kritis, maka H_0 diterima, yang artinya estimasi yang digunakan dalam regresi data panel adalah metode *Common Effect* bukan metode *Random Effect* (Silalahi, 2014).

Uji LM tidak digunakan apabila pada uji Chow dan uji Hausman menunjukkan model yang paling tepat adalah *Fixed Effect Model*. Uji LM dipakai apabila pada uji Chow menunjukkan model yang dipakai adalah *Common Effect Model*, sedangkan pada uji Hausman menunjukkan model yang paling tepat adalah *Random Effect Model*. Maka diperlukan uji LM sebagai tahap akhir untuk menentukan model *Common Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat (Silalahi, 2014).

G. Uji Kriteria Statistik

Evaluasi model berdasarkan kriteria statistik dilakukan dengan beberapa pengujian antara lain sebagai berikut:

3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen dalam model dapat menjelaskan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Nilai tersebut menunjukkan seberapa dekat garis

regresi yang diestimasi dengan data yang sesungguhnya. Nilai R^2 terletak antara nol hingga satu. Semakin mendekati nilai satu maka model akan semakin baik.

3.2 Uji F-statistik

Uji F-statistik digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen yang digunakan dalam penelitian secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen. Nilai F-statistik yang besar lebih baik dibandingkan dengan nilai F-statistik yang rendah. Nilai Prob (F-statistik) merupakan tingkat signifikansi marginal dari F-statistik. Dengan hipotesis pengujian sebagai berikut:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$$H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$$

Dimana,

β_1 = subsidi

β_2 = *foreign direct investment*

β_3 = *government effectiveness*

β_4 = *rule of law*

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- (1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- (2) Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika H_0 ditolak, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Jika H_0 diterima berarti variabel bebas yang diuji tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

3.3 Uji t-statistik

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan hipotesis pengujian sebagai berikut:

1. $H_{o(1)}$: Diduga subsidi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara ASEAN, sehingga hipotesis pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_{o(1)}: \beta_1 = 0$$

$$H_{a(1)}: \beta_1 > 0$$

2. $H_{o(2)}$: Diduga *Foreign Direct Investment* (FDI) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN, sehingga hipotesis pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_{o(2)}: \beta_2 = 0$$

$$H_{a(2)}: \beta_2 > 0$$

3. $H_{o(3)}$: Diduga *government effectiveness* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN, sehingga hipotesis pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_{o(3)}: \beta_3 = 0$$

$$H_{a(3)}: \beta_3 > 0$$

4. $H_{o(4)}$: Diduga *rule of law* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN, sehingga hipotesis pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_0(4): \beta_4 = 0$$

$$H_a(4): \beta_4 < 0$$

Kriteria pengujiannya adalah:

- (1) H_0 ditolak dan H_a diterima, jika $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$; $t\text{ hitung} \leq t\text{-tabel}$
- (2) H_0 diterima dan H_a ditolak, jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$; $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$.

Jika H_0 ditolak, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Jika H_0 diterima berarti variabel bebas yang diuji tidak berpengaruh terhadap variabel terikat, sebaliknya jika H_0 ditolak maka berpengaruh positif terhadap variabel terikat.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil uji regresi dan analisis data mengenai pengaruh kebijakan Subsidi, *Foreign Direct Investment* (FDI) dan Tata Kelola Pemerintahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di negara-negara ASEAN, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Subsidi (SUB) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015.
2. *Foreign Direct Investment* (FDI) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015.
3. *Government Effectiveness* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015.
4. *Rule of Law* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015.
5. *Regulatory Quality* menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015.
6. *Control of Corruption* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015.

7. Ada tiga negara yang memiliki koefisien *fixed effect* bernilai negatif yaitu Kamboja, Malaysia dan Singapura sehingga pertumbuhan ekonominya bergantung kepada kebijakan subsidi, FDI dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan ada empat negara yang memiliki koefisien *fixed effect* bernilai positif yaitu Indonesia, Laos, Filipina dan Thailand yang pertumbuhan ekonominya dipengaruhi oleh faktor selain kebijakan subsidi, FDI serta tata kelola pemerintahan seperti sumber daya alam, pertanian, dan lain-lain.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan kebijakan subsidi pemerintah harus mengawasi dan menjalankannya dengan sesuai sehingga akan tepat sasaran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan subsidi masih diperlukan terutama di negara-negara yang perekonomian masyarakatnya masih di bawah rata-rata, di mana mata pencaharian lebih banyak di bidang pertanian dan sektor ekonomi kecil lainnya. Maka yang harus diperhatikan dari kebijakan subsidi adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
2. Untuk sektor FDI, setiap negara harus memiliki daya tarik baik dari sisi ekonomi, sosial maupun politiknya agar para investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Dengan memperbaiki iklim usaha, adanya kenyamanan dan keamanan dalam negara akan membuat para investor memilih untuk berinvestasi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, FDI perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah sehingga adanya FDI tidak hanya dinikmati oleh investor tapi juga dirasakan oleh negara tujuan dengan adanya transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja.
3. Tata kelola pemerintahan yang dipatuhi dan ditegakkan dengan baik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara ASEAN. Dimana indikator *government effectiveness*, *regulatory quality*, dan *control of corruption* dapat dilaksanakan dan dipercepat dengan

menegakkan aturan hukum (*rule of law*), karena tujuh negara ASEAN masih kurang menaati aturan hukum yang berlaku di negaranya masing-masing. Penegakan hukum atau *rule of law* harus menjadi fokus bagi setiap negara yang menjadi objek dalam penelitian ini. Hal ini karena penegakan hukum akan memberikan rasa aman, nyaman dan kepatuhan bagi masyarakat dan berdampak langsung dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. 1998. *Annual Report*. Manila. Asian Development Bank (ADB).
- Aidt, Toke, Jayasri Dutta dan Vania Sena. 2008. *Governance Regimes, Corruption and Growth: Theory and Evidence*. *Journal of Comparative Economics* 36 (2008) 195–220.
- Alam, Rafayet, Erick Kitenge, and Bizuayehu Bedane. 2017. *Government Effectiveness and Economic Growth*. *Economic Buletin*. Vol 37 issue 1.
- Aldaba, M. Rafaelita dan Josef T. Yap, 2009. *Investment and Capital Flows: Implication of the ASEAN Economic Community*. Philippine Institute for Development Studies.
- Anoraga, Pandji. 1995. *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Azam, Muhammad., Khan, Saleem., Zainal, binti Zalina., Karuppiah, Namasivayam., Khan, Farah. 2015. *Foreign Direct Investment and Human Capital: Evidence From Developing Countries*. *Investment Management and Financial Innovation*, 12 (3-1). Journal.
- Badun, Marijana. 2006. *The Quality of Governance and Economic Growth in Croatia*. Occasional Paper No. 29.
- Baltagi, Bagi. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition*. John Wiley & Sons.
- Bayar, Yilmaz. 2016. *Public Governance And Economic Growth In The Transitional Economies Of The European Union*. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, No. 48 E/2016, pp. 5-18.
- Case, E. Karl dan Fair, C. Ray. 2004. *Principles of Economics*. Penerbit Pearson.
- Dewi, Putu Kartika dan Nyoman Triaryati. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga dan Pajak terhadap Investasi Asing Langsung*. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 4, No. 4, 2015: 866-878.

- Doucouliaagos, H., and Lamsiraroj, S. 2015. *Does Growth Attract FDI?*. Discussion Paper No.2015-18, Kiel Institute for the World Economy. <http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2015-18>.
- Haggard, Stephan and Tiede, Lydia. 2010. *The Rule Of Law and Economic Growth: Where Are We?*. The University of Texas School of Law Conference on Measuring the Rule of Law.
- Hariyati, Yuli. 2007. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: CSS.
- Huynh, Kim P. dan David T. Jacho-Chávez. 2009. *Growth and Governance: A Nonparametric Analysis*. Journal of Comparative Economics 37 ; 121–143.
- Jhingan, ML. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Edisi 1 cetakan ke-10. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi. 2005. *Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004*. World Bank Policy Research WorkingPaper No. 3630. Washington, D.C.
- Kaufman, Daniel, Aart Kraay dan Pablo Zoido- Lobatón. 2009. *Governance Matters II – Update Indicators for 2000/01*. World Bank Policy Research Working Paper No. 2772, Washington, D.C.
- Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi. 2010. *The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues*. Global Economy and Development. Brookings Institution.
- Krugman R. Paul dan Maurice Obsfeld. 1999. *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Lumban Gaol, Marlina. 2016. *Pengaruh Good Governance terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyani, Ari, P. 2015. *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia*; 154.
- Omar, Z dan Kanan, F.P. 2016. *Ke Arah Subsidi Sebagai Alat Pembangunan Ekonomi*. Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia.
- Plummer, M., 2007. *Completing the AIA Road Traveled, Road Ahead*. Project of the East- West Center for the ASEAN Secretariat.
- Prihtiyani, Eny. 2011. *Laos Mengatasi Ketertinggalan Ekonomi*. Kompas. Jakarta.

- Riyad, Mohammad. 2012. *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Enam Negara ASEAN tahun 1990-2009*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Rahayu, Ade Yulianti. 2012. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Perdagangan Internasional, dan Foreign Direct Investment di Indonesia (Periode 1990:Q1-2010:Q4)*, Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rivera – Batiz, Fransisco L. 2007. *How Do Migrant from Latin America and the Carribean Fare in the US Labor Market?.* World Economy. 30(9) : 1399-1429.
- Romer, P. 2007. *Endogenous Technical Change*. Journal of Political Economy. 98(5): S71-102.
- Resnick, Danielle dan Regine Birner. 2006. *Does Good Governance Contribute to Pro-Poor Growth? A Review of Thevidence from Cross-Country Studies*. DSGD Discussion Paper No. 30.
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus. 2004. Edisi Tujuh Belas. *Ilmu Makro-ekonomi*. Edisi Tujuh Belas, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Silalahi, dkk. 2014. *Analisis Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Dengan Metode Regresi Data Panel*. Jurnal. Vol. 02, No. 03, pp. 237-251. ISSN: 2337-9197, hlm: 239-241.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: AFABETA, cv.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka.
- Spencer, Milton H. and Orley M. Amos, Jr. *Contemporary Macroeconomics*. Edisi ke-8, 1993, New York: Worth Publishers.
- Todaro, P. Michael dan Smith, C. Stephen. 2006. *Economic Development, 9th Edition*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- T. T. Hoang, P. Wiboonchutikula and B. Tubtimtong. 2010. “Does Foreign Direct Investment Promote Economic Growth in Vietnam?” ASEAN Economic Bulletin, Vol. 27, No. 3, 2010, p. 295. doi:10.1355/ae27-3d.
- Urata, S. dan Ando, M., 2010. “Investment Climate Study of ASEAN Member Countries”, ERIA Research Project Report 2009-3.Jakarta: ERIA. pp.162-232.
- Wibowo, Edy. 2013. *Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN*. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang.

<https://www.mcc.gov/> diakses pada tanggal 20 September 2017.

<http://www.wisegeek.org/what-is-keynesian-economics.htm> diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

<http://www.worldbank.org> diakses pada tanggal 20 September 2017.

<http://www.worldbank.org> diakses pada tanggal 01 Maret 2018.

<http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home> diakses 25 Desember 2017

https://en.wikipedia.org/World_Governance_Index diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

<https://www.economist.com/economics-a-to-z/s#node-21529341> diakses 01 maret 2018

UNDP (2008). *A Users' Guide to Measuring Corruption*.
<http://www.globalintegrity.org/information/books>.